



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah perlu adanya penguatan sistem inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

7. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Roadmap Penguatan SIDA adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi Roadmap Penguatan SIDA saat ini, tantangan dan peluang Roadmap Penguatan SIDA, kondisi Roadmap Penguatan SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan Roadmap Penguatan SIDA, fokus dan program prioritas Roadmap Penguatan SIDA dan rencana aksi penguatan Roadmap Penguatan SIDA.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen arah kebijakan perencanaan pembangunan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program perencanaan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan *roadmap* penguatan sistem inovasi, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi *Roadmap* SIDA, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif; dan
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja.

BAB III DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 4

Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum;
- c. BAB III : Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA;
- d. BAB IV : Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA;

- f. BAB VI : Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA; dan
- g. BAB VII : Rencana Aksi Penguatan SIDA.

Pasal 5

Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. membangun basis data inovasi Daerah;
- b. menyusun regulasi yang mendukung inovasi;
- c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif;
- d. membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan;
- e. membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga; dan
- f. meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung visi misi Walikota.

Pasal 6

Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA dan penjelasan sistematika Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan *Roadmap* Penguatan SIDA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide dan/atau informasi.
- (3) Data, gagasan/ide dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Ravienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengelola sebuah wilayah, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah yang harus berinovasi, melainkan juga semua elemen masyarakat.

Inovasi disini merupakan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda.

Pada dasarnya manfaat inovasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya.

Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan. Adapun inovasi yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepentingan umum;
6. Terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2012 dan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Sistem Inovasi Daerah

1.3 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 adalah **“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”**. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **Gotong Royong**

Nilai Gotong Royong merupakan nilai luhur yang tumbuh di kawasan desa di Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Gotong royong merupakan pengarahannya tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam

pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai element tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya.

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansian serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Kota Dunia Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya Mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya. serta dapat terhubungnya

tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah, dengan penjabaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Surabaya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak.

Lokomotif perekonomian Kota Surabaya merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak

bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah.

Penciptaan iklim investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota Surabaya tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa timur serta di nasional dalam sektor perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional melalui peningkatan infrastuktur pendukung yang berkualitas dan terintegrasi.

- **Misi Kedua**

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (human capital) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan tinggi dan produktif, sehat jasmani dan rohani serta berkarakter. Maka dari itu investasi manusia (human investment) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Surabaya kedepan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Surabaya perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

- **Misi Ketiga**

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas.

Pembangunan Kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dunia dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- **Misi Keempat**

Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan tata kelola yang baik (*good governance*). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

- **Misi Kelima**

Masyarakat yang bermukim di Kota Surabaya terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang menjadi identitas dari Bangsa Indonesia. Kemajemukan dan Keberagaman masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya tentunya akan membawa kepada dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Diperlukan suatu perekat sosial (*Social Glue*), jembatan sosial (*Social Bridging*), dan pelumas sosial (*Social Oil*) dalam modal sosial masyarakat agar tercipta tatanan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang multi kultur di Kota Surabaya.

Untuk mewujudkan sebagai Kota Dunia maka ketertiban dan keamanan menjadi isu penting yang harus dijaga di Kota Surabaya. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik dan pelanggaran perda yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan. Selain itu potensi yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman lainnya adalah potensi bencana yang mungkin timbul di Kota Surabaya. Peningkatan ketahanan bencana Kota Surabaya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kota melalui perbaikan kualitas mitigasi dan penanganan bencana ditingkat masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Surabaya secara geografis terletak pada 7°21' Lintang Selatan dan 112°36' sampai dengan 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2021, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya ± 32.681 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

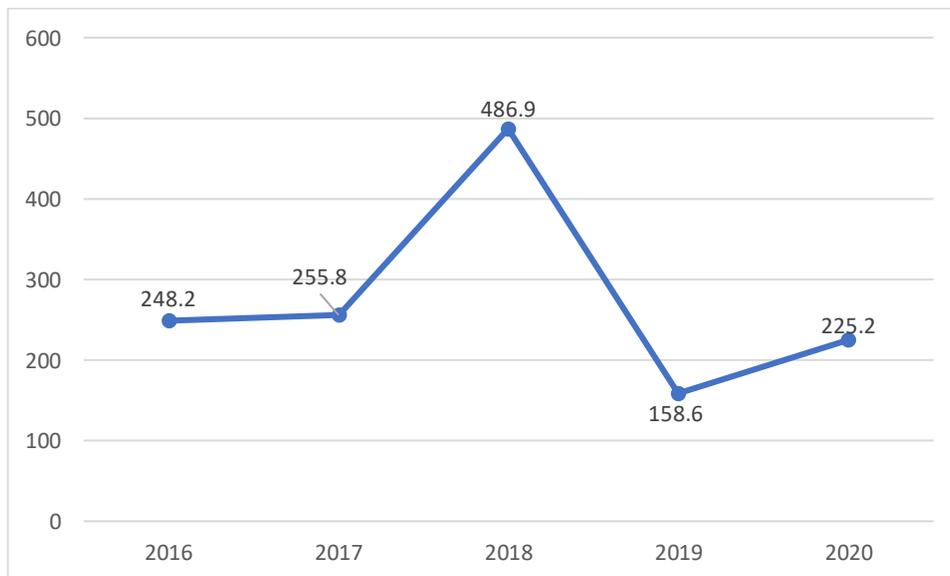
2.1.1.2 Kondisi Geologi dan Hidrologi

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).

Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan terjadi genangan pada musim penghujan.

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Juanda, suhu rata-rata berkisar antara 26,5°C hingga 30,2°C. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, rata-rata 172 mm, tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 dengan curah hujan sebesar 487,8 mm. Gambar 2.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya pada 5 tahun terakhir.



**Gambar 2.1 Rata-Rata Curah Hujan Kota Surabaya
Tahun 2016-2020**

Sumber: Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, 2021

Pada gambar 2.1 penurunan curah hujan sangat drastis terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selisih 328,3 mm antara curah hujan Tahun 2018 dengan Tahun 2019. Namun kembali meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 225,2 mm.

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur. Kota Surabaya dalam skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional, sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah:

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Trans Jawa, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan, sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah

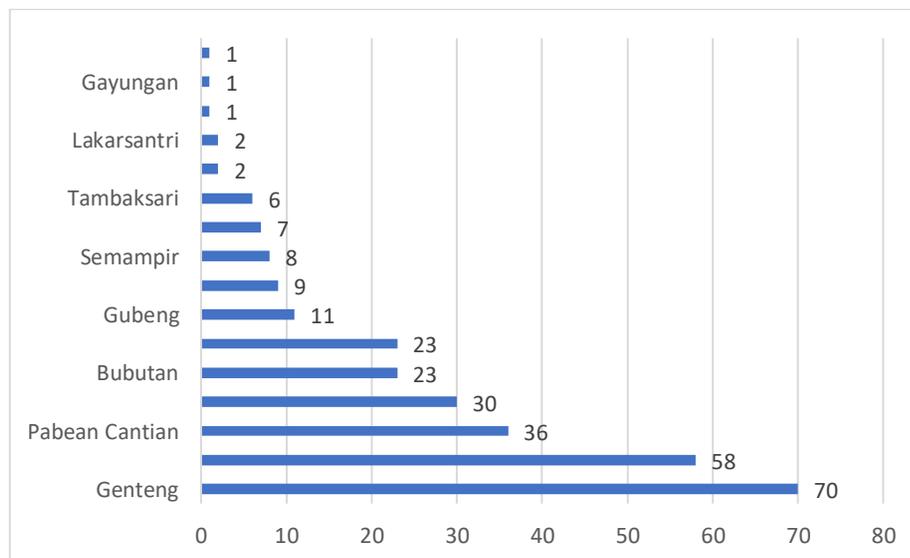
satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940-an hingga akhir 1970-an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku-Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak dapat menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala internasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya, lihat gambar berikut.



Gambar 2.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2020, diolah

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi *mangrove* yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan *Mangrove* Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luas kawasan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini, dan kondisi intrusi air laut di kawasan *mangrove* Pamurbaya.

Tabel 2.1
Luasan Kawasan RTH

No	Jenis RTH (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	RTH kawasan lindung dan pesisir timur (Ha)	4.548,5 9	4.548,5 9	4.548,5 9	4.570,3 3	4.570,3 3
2	RTH hutan kota (Ha)	45,23	55,81	55,81	57,55	66,03
Total (Ha)		4.593,8 2	4.604,4 0	4.604,4 0	4.627,8 8	4.636,3 6

Sumber: Bappeko dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, diolah, 2020

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luas kawasan tersebut ditampilkan pada tabel diatas.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.

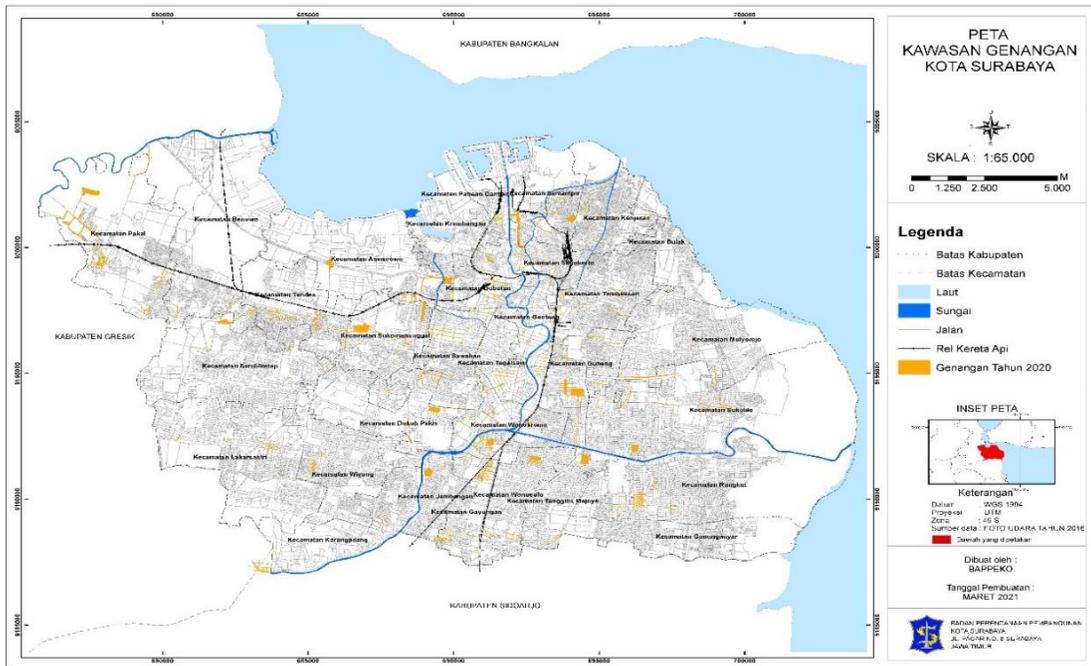
Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota. Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

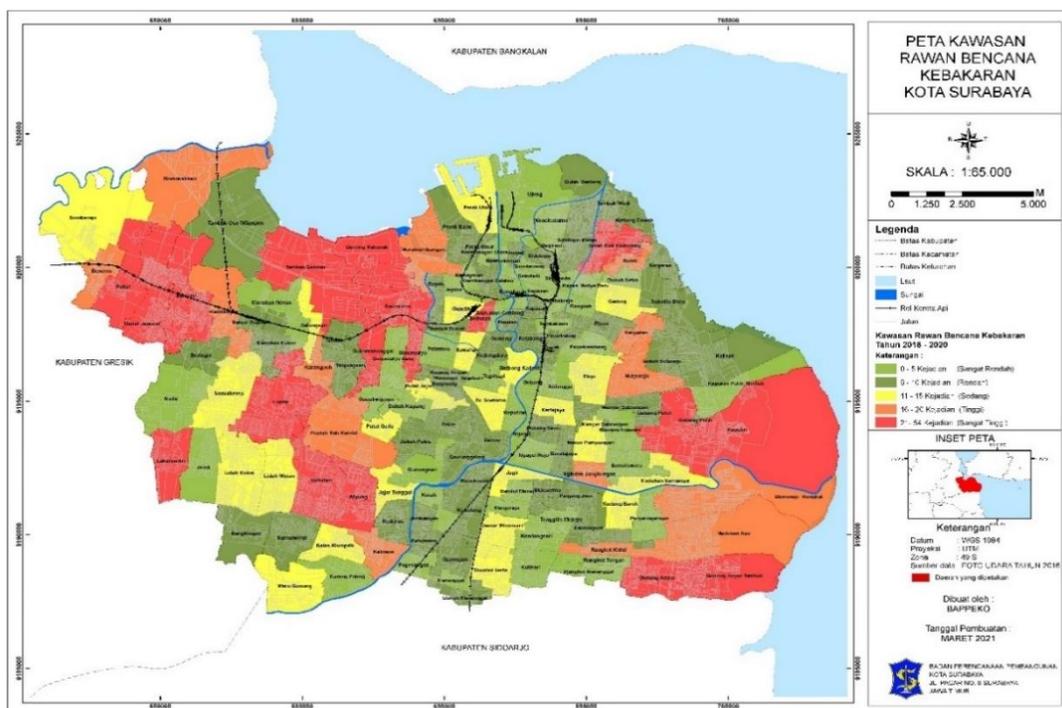
Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya Utara. Kawasan rawan genangan dan Kawasan yang sering terjadi banjir rob di Kota Surabaya seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: BAPPEKO Surabaya, 2020

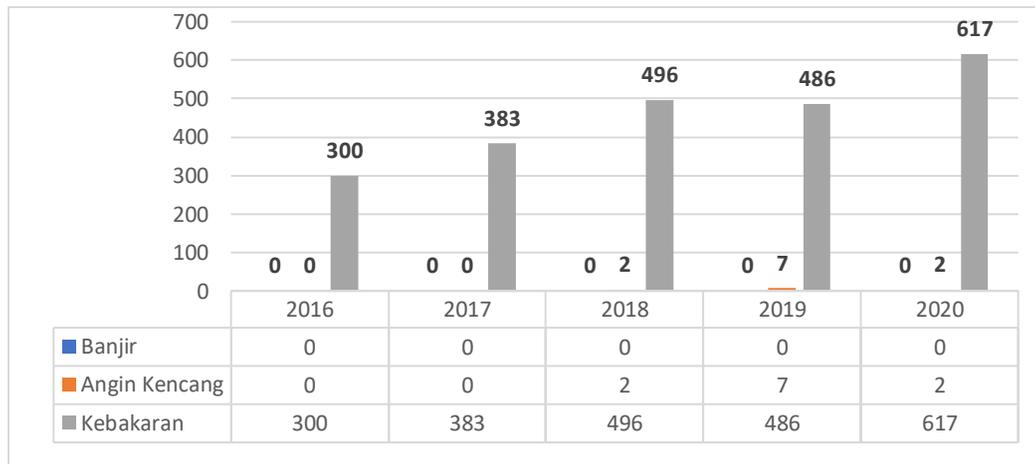
Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: BAPPEKO Surabaya, 2020

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah gambar jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.



Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Surabaya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 Kelurahan Tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Data Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)	3	33	47	154	154

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2020

2.1.3. Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per tahun 2020 adalah sebesar 2.970.730 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada

tabel berikut. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sawahan, Kecamatan, Semampir, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Tegal Sari, dan Kecamatan Wonokromo. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2.3

Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Asemrowo	15,32	46.563	3.039	17	Pakal	19,07	57.805	3.031
2	Benowo	25,11	67.828	2.702	18	Rungkut	22,74	117.287	5.159
3	Bubutan	3,95	98.762	25.022	19	Sambikerep	16,72	65.053	3.891
4	Bulak	5,66	44.975	7.941	20	Sawahan	7,07	201.743	28.548
5	Dukuh Pakis	10,95	59.740	5.454	21	Semampir	8,70	183.158	21.047
6	Gayungan	5,51	43.553	7.899	22	Simokerto	2,77	94.619	34.130
7	Genteng	14,12	58.450	4.139	23	Sukolilo	28,72	110.705	3.854
8	Gubeng	7,80	135.817	17.410	24	Sukomanunggal	9,29	103.814	11.171
9	Gunung Anyar	9,77	59.048	6.045	25	Tambaksari	9,30	225.507	24.242
10	Jambangan	4,54	52.249	11.512	26	Tandes	9,76	91.827	9.412
11	Karang Pilang	9,98	74.281	7.446	27	Tegalsari	4,29	98.904	23.052
12	Kenjeran	8,73	172.452	19.751	28	Tenggilis Mejoyo	5,85	58.239	9.960
13	Krembangan	8,73	114.807	13.158	29	Wiyung	11,39	72.522	6.368
14	Lakarsantri	19,27	60.770	3.153	30	Wonocolo	6,54	79.361	12.143
15	Mulyorejo	12,77	86.407	6.764	31	Wonokromo	8,32	159.138	19.133
16	Pabean Cantian	5,58	75.346	13.512					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.496.742 jiwa atau 50,38 persen penduduk perempuan dan 1.473.988 jiwa atau 49,62 persen penduduk laki-laki yang dapat dilihat pada tabel berikut.

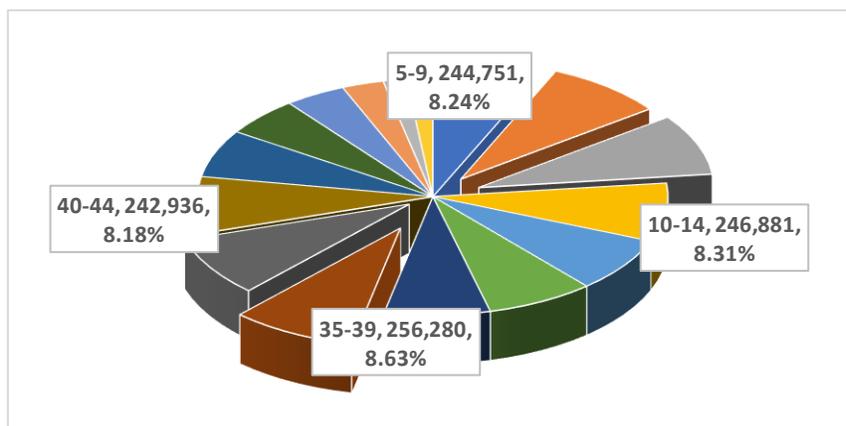
Tabel 2.4

Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020 Kota Surabaya (Jiwa)

Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	101.100	95.746	196.846	45-49	110.905	114.431	225.336
5-9	126.167	118.584	244.751	50-54	94.557	99.460	194.017
10-14	127.195	119.686	246.881	55-59	73.855	82.882	156.737
15-19	121.578	115.556	237.134	60-64	58.864	66.421	125.285
20-24	113.453	109.531	222.984	65-69	40.450	44.725	85.175
25-29	109.461	110.719	220.180	70-74	21.067	26.457	47.524
30-34	107.083	108.008	215.091	75+	21.614	31.959	53.573
35-39	126.823	129.457	256.280	Total	1.473.988	1.496.742	2.970.730
40-44	119.816	123.120	242.936				

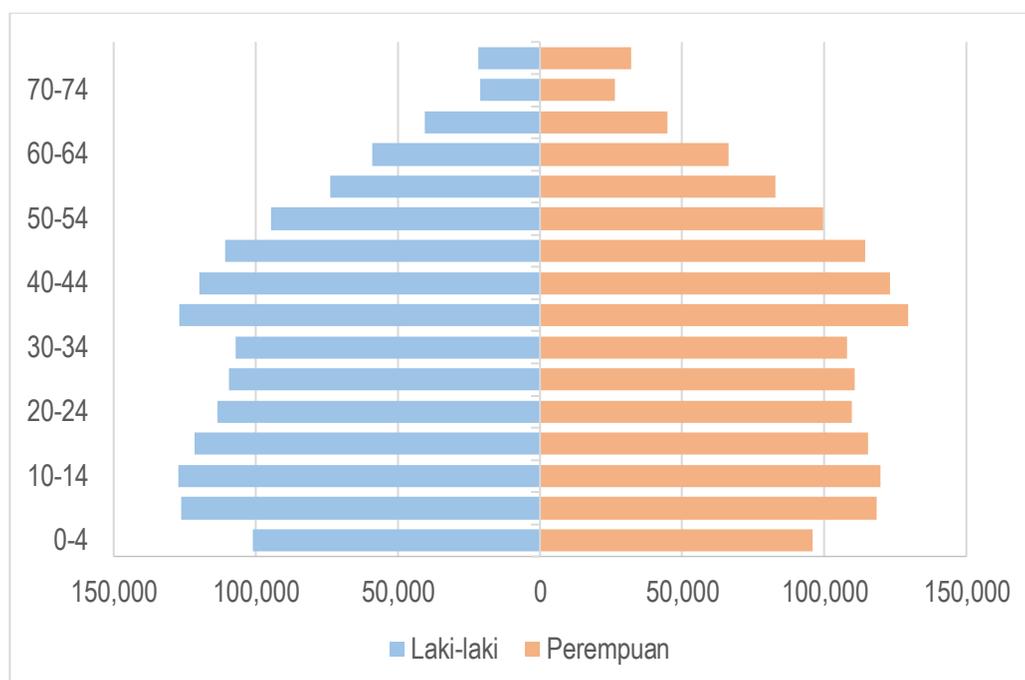
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Gambar di bawah menunjukkan bahwa kelompok usia 35-39 tahun populasinya tertinggi dari kelompok usia lainnya. Kemudian diikuti berturut-turut oleh kelompok usia 10-14 tahun dan 5-9 tahun. Ini menunjukkan bahwa angka kelahiran yang masih sedikit lebih tinggi dibanding angka kematian merujuk pada bentuk piramida penduduk muda (*expansive*), yang cenderung menuju ke arah bentuk piramida penduduk stasioner.



Gambar 2.7 Persentase Jumlah Penduduk Kelompok Usia Kota Surabaya Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah



Gambar 2.8 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2020 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 185.053 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 299.966 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 144.872 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 142.153 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada akhir tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2020

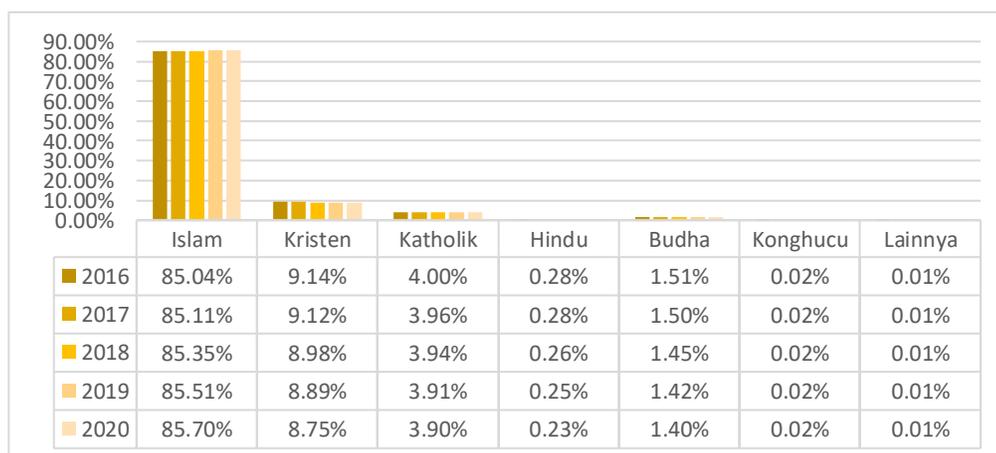
No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.204	5.099	2.500	2.331
2	Benowo	4.319	7.239	3.537	3.461
3	Bubutan	5.832	9.891	4.965	4.767
4	Bulak	2.866	4.766	2.353	2.327
5	Dukuh Pakis	3.508	5.848	2.813	2.708
6	Gayungan	2.542	4.228	2.087	2.076
7	Genteng	3.230	5.456	2.793	2.712
8	Gubeng	7.462	12.647	6.262	6.146
9	Gunung Anyar	3.708	5.988	2.784	2.690
10	Jambangan	3.332	5.328	2.541	2.429
11	Karang Pilang	4.437	7.111	3.545	3.538
12	Kenjeran	11.744	18.958	8.995	8.849
13	Krembangan	7.104	11.768	5.634	5.586
14	Lakar Santri	3.776	6.270	3.055	3.015

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
15	Mulyorejo	5.010	8.238	4.039	3.870
16	Pabean Cantian	4.461	7.668	3.773	3.655
17	Pakal	3.599	6.024	2.987	3.096
18	Rungkut	7.287	11.666	5.480	5.174
19	Sambikerep	4.018	6.631	3.124	3.090
20	Sawahan	11.574	20.296	9.873	9.658
21	Semampir	12.463	20.440	9.587	9.386
22	Simokerto	5.710	9.417	4.487	4.577
23	Sukolilo	6.782	11.055	5.159	5.073
24	Sukomanunggal	6.214	10.416	4.836	4.714
25	Tambak Sari	13.278	22.344	10.622	10.695
26	Tandes	5.712	9.586	4.612	4.205
27	Tegalsari	5.680	9.806	4.671	4.635
28	Tenggilis Mejoyo	3.450	5.680	2.698	2.544
29	Wiyung	4.280	7.032	3.451	3.497
30	Wonocolo	4.774	7.845	3.815	3.654
31	Wonokromo	8.697	15.225	7.794	7.995
Jumlah		180.053	299.966	144.872	142.153

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel 2.5 diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk dapat dilihat pada gambar berikut.

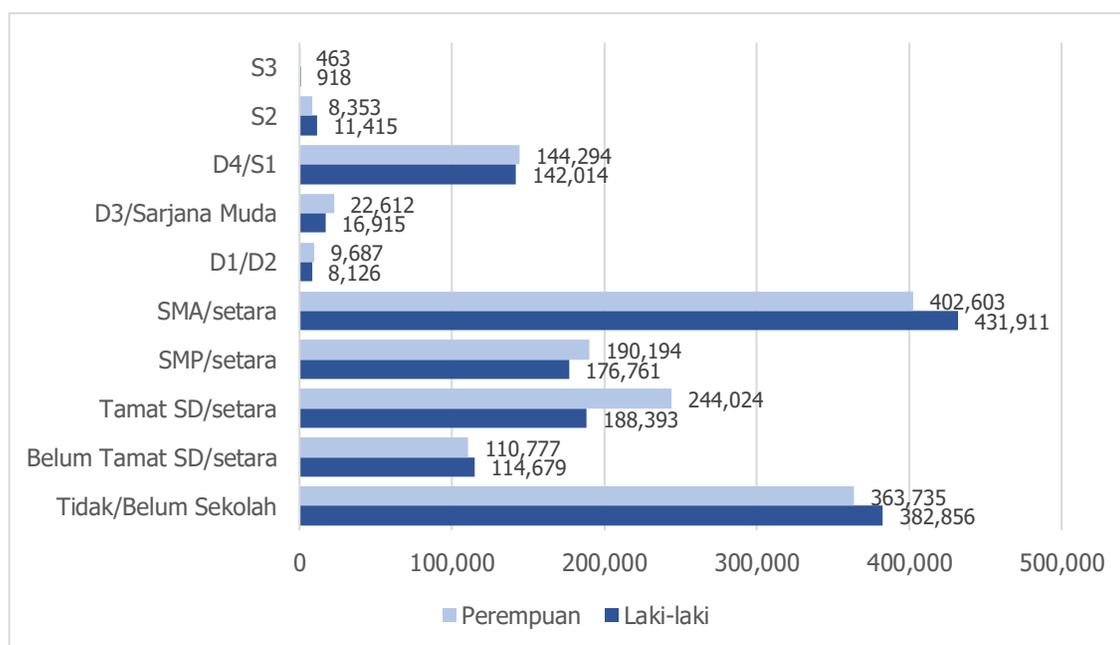


Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,70% sedangkan sebesar 14,30% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 286.308 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 834.514 orang, tidak/belum sekolah sebanyak 746.591 orang, belum tamat SD/Sederajat sebanyak 225.456 orang dan tamat SD/ sederajat sebanyak 432.417 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan per jenis kelamin ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 82 jenis pekerjaan, jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja menjadi yang terbanyak, dengan proporsi mencapai 27,83 persen. Karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 27,47 persen. Posisi kedua

ditempati oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, sebesar 16,18 persen dan di posisi ketiga adalah pelajar/mahasiswa sebesar 16,18 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%	No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
1	Belum/Tidak Bekerja	826.616	27,83	42	Tukang Las Pandai Besi	149	0,01
2	Karyawan Swasta	816.057	27,47	43	Seniman	147	0,00
3	Mengurus Rumah Tangga	536.532	18,06	44	Arsitek	120	0,00
4	Pelajar/Mahasiswa	480.638	16,18	45	Tukang Listrik	115	0,00
5	Wiraswasta	155.589	5,24	46	Buruh Nelayan Perikanan	88	0,00
6	Pegawai Negeri Sipil	39.591	1,33	47	Juru Masak	76	0,00
7	Guru	23.033	0,78	48	Ustadz/Mubaligh	74	0,00
8	Pensiunan	19.110	0,64	49	Penata Rias	72	0,00
9	Tentara Nasional Indonesia	11.181	0,38	50	Akuntan	65	0,00
10	Pedagang	7.439	0,25	51	Penata Rambut	63	0,00
11	Dosen	6.139	0,21	52	Tukang Sol Sepatu	60	0,00
12	Dokter	6.077	0,20	53	Psikiater/Psikolog	48	0,00
13	Karyawan BUMN	5.930	0,20	54	Tukang Cukur	41	0,00
14	Buruh Harian Lepas	5.129	0,17	55	Peneliti	39	0,00
15	Kepolisian RI	4.560	0,15	56	Peternak	30	0,00
16	Lainnya	4.287	0,14	57	Pastor	28	0,00
17	Petani Pekebun	3.134	0,11	58	Penata Busana	19	0,00
18	Perdagangan	2.868	0,10	59	Penerjemah	19	0,00
19	Perawat	2.676	0,09	60	Pilot	18	0,00
20	Sopir	1.891	0,06	61	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	17	0,00
21	Karyawan Honorer	1.731	0,06	62	Penyiar Radio	17	0,00
22	Tukang Batu	1.395	0,05	63	Perancang Busana	16	0,00
23	Nelayan Perikanan	1.084	0,04	64	Buruh Peternakan	15	0,00
24	Bidan	825	0,03	65	Imam Masjid	15	0,00
25	Karyawan BUMD	613	0,02	66	Anggota DPRD Provinsi	12	0,00
26	Pembantu Rumah Tangga	554	0,02	67	Tabib	10	0,00
27	Pendeta	506	0,02	68	Pialang	9	0,00
28	Industri	505	0,02	69	Penyiar Televisi	8	0,00
29	Tukang Jahit	495	0,02	70	Tukang Gigi	7	0,00
30	Mekanik	383	0,01	71	Anggota DPR RI	7	0,00
31	Apoteker	354	0,01	72	Paraji	4	0,00
32	Pelaut	316	0,01	73	Perangkat Desa	4	0,00
33	Buruh Tani/Perkebunan	314	0,01	74	Anggota Kabinet Kementerian	3	0,00
34	Transportasi	271	0,01	75	Paranormal	3	0,00
35	Konstruksi	269	0,01	76	Wakil Walikota	2	0,00
36	Tukang Kayu	269	0,01	77	Kepala Desa	2	0,00
37	Wartawan	215	0,01	78	Gubernur	1	0,00
38	Pengacara	200	0,01	79	Promotor Acara	1	0,00
39	Notaris	189	0,01	80	Anggota BPK	1	0,00
40	Konsultan	181	0,01	81	Duta Besar	1	0,00
41	Biarawati	157	0,01	82	Wakil Bupati	1	0,00

Sumber: Data Penduduk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang dimaksud terdiri dari:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Keterangan di atas diperinci pada tabel berikut.

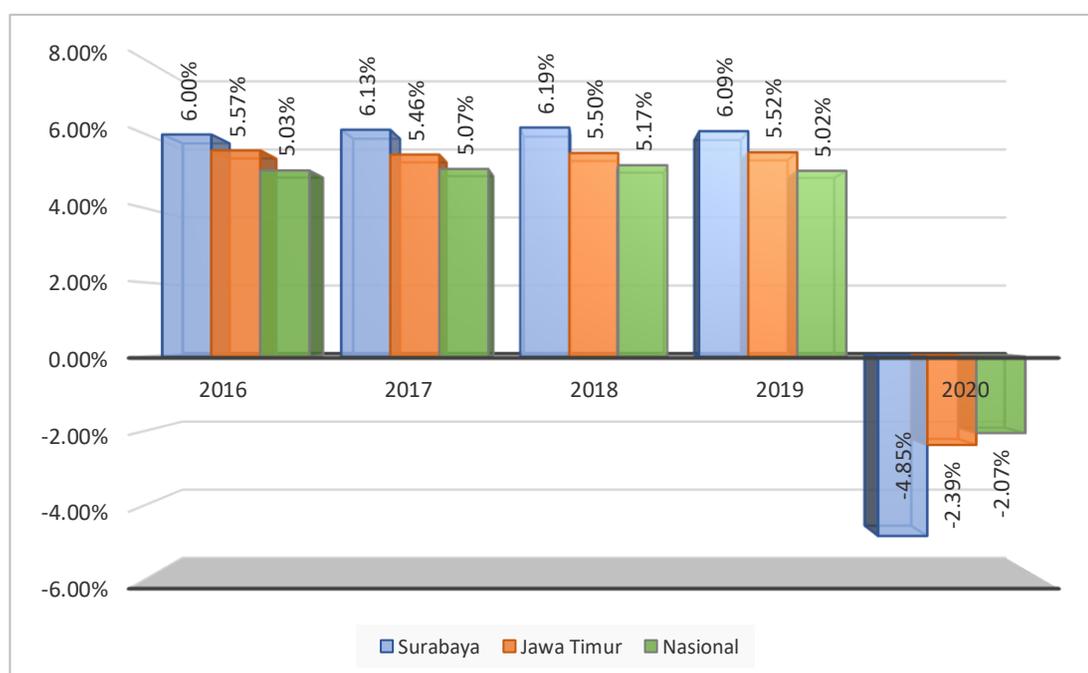
**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016–2020**

Kategori	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	4,36	3,35	-1,44	-0,90	-4,90
B	Pertambangan dan Penggalian (%)	3,14	2,58	1,06	0,09	-6,34
C	Industri Pengolahan (%)	4,91	4,95	4,92	5,39	-1,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	1,75	-0,07	0,41	-6,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	5,92	6,83	3,32	3,92	4,02
F	Konstruksi (%)	5,01	6,92	6,28	5,45	-5,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,82	6,01	6,34	5,88	-8,57
H	Transportasi dan Pergudangan (%)	4,89	6,87	7,56	7,62	-4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	8,63	8,64	7,78	7,66	-10,87
J	Informasi dan Komunikasi (%)	6,98	6,93	6,83	7,49	7,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	7,65	2,92	4,84	3,49	0,23
L	Real Estate (%)	5,32	5,08	5,78	6,09	2,00
M,N	Jasa Perusahaan (%)	5,05	6,66	7,12	6,84	-7,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%)	5,09	4,85	2,17	3,64	-2,33
P	Jasa Pendidikan (%)	6,02	5,95	6,24	6,66	2,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	5,85	5,87	7,81	7,64	8,75
R,S,T,U	Jasa lainnya (%)	4,99	2,89	5,18	5,94	-16,30
	PDRB (%)	6,00	6,13	6,19	6,09	-4,85
	PDRB Tanpa Migas (%)	6,00	6,13	6,19	6,09	-4,85

Sumber data: BPS Kota Surabaya, diolah, 2021

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi. Di antara kategori lapangan usaha yang masih tumbuh di tengah kondisi seperti ini, yakni kategori E, J, K, L, P, dan Q. Diharapkan ke depannya, 6 lapangan usaha yang masih bisa *survive* ini dapat membantu mengakselerasi adaptasi bagi kategori lapangan usaha lain untuk bangkit di normal yang baru.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2020 juga tidak lepas dari kontraksi lebih dari 2 persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 –2020

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib Pemerintahan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

2.3.1.1 Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Kondisi sarana prasarana gedung/ bangunan sekolah negeri dalam kewenangan Pemerintah Kota selalu dalam kondisi baik karena termasuk prioritas yang diperbaiki terlebih dahulu jika terdapat kerusakan. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah (unit)	733	900	846	851	857
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (jiwa)	304.652	281.089	286.373	303.021	299.966
1.3.	Rasio (rasio)	1:415	1:312	1:339	1:356	1:350
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah (unit)	341	393	404	412	413
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (jiwa)	158.893	144.127	141.554	146.952	144.872
2.3	Rasio (rasio)	1:465	1:367	1:350	1:357	1:351

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi juga menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi, maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah. Secara umum, kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan status sertifikasi guru, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang (Satuan)	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK (guru)	9	0	8	0	0	121	9	0	147
SD (guru)	49	3	52	10	2	3.222	400	1	3.739
SMP (guru)	0	6	4	9	0	1.357	366	0	1.742
Total (guru)	90	9	64	19	2	4.809	803	1	5.765

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Tabel 2.10 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang (Satuan)	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK (guru)	818	40	107	49	5	3.033	64	0	4.116
SD (guru)	331	14	54	42	16	8.250	358	2	9.067
SMP (guru)	47	4	3	23	4	4.077	349	1	4.508
Total (guru)	1.196	58	164	114	25	15.360	771	3	17.691

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel 2.11 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2020

No	Jenjang (Satuan)	Guru Bersertifikat Pendidik (guru)			Jumlah Total Guru (guru)			Guru Yang Belum Sertifikasi (guru)		
		PNS	Non PNS	Jumlah (guru)	PNS	Non PNS	Jumlah (guru)	PNS	Non PNS	Jumlah (guru)
1	SD (guru)	3.289	2.431	5.720	3.739	9.067	12.806	450	6.636	7.086
2	SMP (guru)	1.636	1.608	3.244	1.742	4.508	6.250	106	2.900	3.006
	Jumlah	4.925	4.039	8.964	5.481	13.575	19.056	556	9.536	10.092

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 7.086 guru SD/setara dan 3.006 guru SMP /setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.3.1.2 Kesehatan

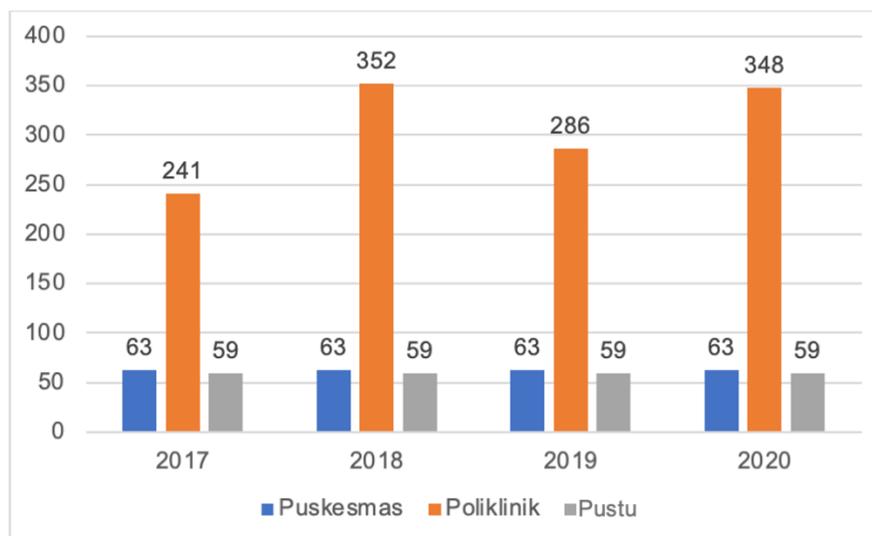
Kualitas sumber daya manusia di Kota Surabaya salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Indikator derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 2.12 Cakupan Layanan Fasilitas Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Sakit (unit)	Jumlah Klinik (unit)	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	Total Fasilitas Kesehatan (faskes)	Cakupan Layanan Fasilitas Kesehatan jiwa/faskes)
Surabaya Pusat	350.735	8	18	9	9	44	7.971
Surabaya Barat	493.660	8	22	11	12	53	9.314
Surabaya Selatan	742.587	18	66	16	16	116	6.402
Surabaya Timur	793.010	20	88	14	13	135	5.874
Surabaya Utara	590.738	5	24	13	9	51	11.583
Total	2.970.730	59	218	63	59	399	7.445

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Kesehatan, menyediakan 63 Puskesmas dan 59 Puskesmas Pembantu. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2020 sejumlah 2.970.730 jiwa, maka 1 fasilitas kesehatan rata-rata kurang lebih melayani 24.350 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 fasilitas kesehatan maksimal melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya sudah mencukupi standar tersebut. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap akan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun jumlah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan klinik tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.12 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2017–2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi) (rumah sakit)	3	4	3	4	7
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi (rumah sakit)	4	4	4	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI (rumah sakit)	7	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah (rumah sakit)	2	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta (rumah sakit)	43	42	43	43	42
	Jumlah Rumah Sakit (rumah sakit)	59	59	59	59	62
	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk (%)	0,0178	0,0179	0,0191	0,0187	0,0209

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Kota Surabaya, keseluruhan fasilitas kesehatan tersebut telah didukung oleh tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.14 Jumlah Dokter Umum dan Spesialis Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter umum (orang)	3.579	3.840	4.113	4.452	4.719
2	Jumlah dokter gigi (orang)	1.429	1.524	1.603	1.692	1.732
3	Jumlah dokter spesialis (orang)	2.351	2.537	2.701	2.891	3.030
Total jumlah dokter (orang)		7.359	7.901	8.417	9.035	9.481

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah tenaga medis dari tahun ke tahun, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. Pada tahun 2016 jumlah tenaga medis sebanyak 7.359 orang dan meningkat menjadi 7.901 orang pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 8.417 orang dan pada tahun 2019 menjadi 9.035 orang. Pada tahun 2020, jumlah tenaga medis di Kota Surabaya meningkat menjadi 9.481 orang.

Tenaga medis sebagaimana tersebut di atas, juga termasuk tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya yaitu di RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohammad Soewandhie, dan puskesmas. Pada tahun 2020, jumlah dokter di fasilitas kesehatan tersebut sebanyak 336 orang dokter, 136 orang dokter gigi, dan 123 orang dokter spesialis, sebagaimana tabel berikut.

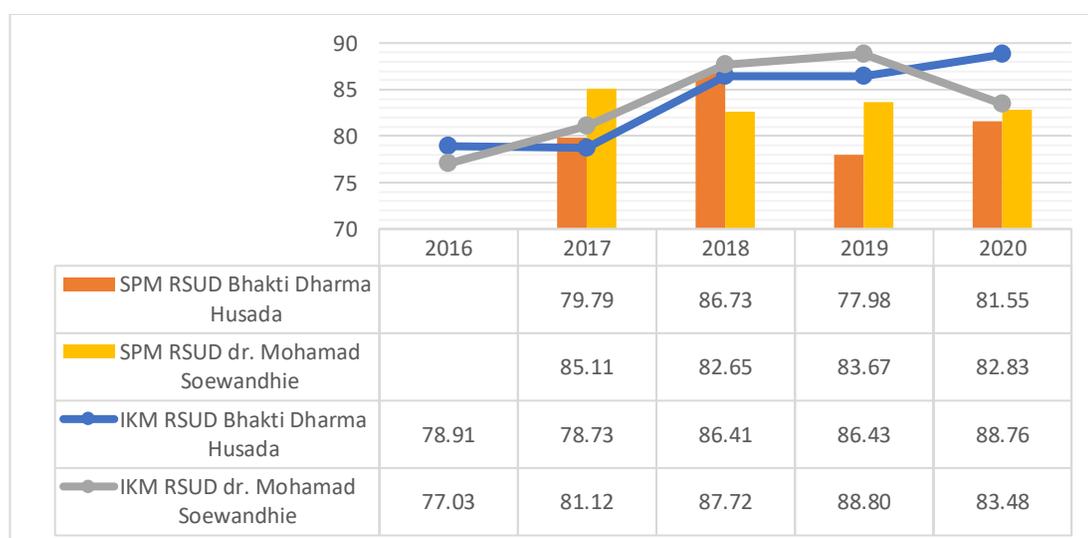
Tabel 2.15 Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020

No	Fasilitas Kesehatan (Satuan)	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis
1	RSUD Bhakti Dharma Husada (orang)	26	3	46
2	RSUD dr. Mohammad Soewandhie (orang)	29	2	77
3	Puskesmas (orang)	281	131	0
Jumlah (orang)		336	136	123

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Belum optimalnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan dokter, baik secara jumlah maupun jenis dokter spesialis. Pada tahun 2020, baik di RSUD Bhakti Dharma Husada maupun RSUD dr. Mohammad Soewandhie masih membutuhkan penambahan jumlah dokter maupun jenis dokter spesialis, antara lain spesialis urologi, forensik, bedah thorax kardiovaskuler, mikro biologi klinik, *obgyn*, anak, radiologi, penyakit dalam, anastesi. Sedangkan di puskesmas masih membutuhkan penambahan jumlah dokter umum.

Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Hal ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Dari grafik pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di bawah, meski dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.



Gambar 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Bagian Organisasi, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad Soewandhie, diolah, 2020

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga

pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Penetapan status ruas jalan yang menjadi jalan kota di Kota Surabaya telah disahkan melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/303/436.1.2/2019 dalam rangka semakin meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang dimanfaatkan masyarakat. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697,39 kilometer melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.730 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Pada Tahun 2019, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.683,11 km dari panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada Tahun 2020, panjang jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86	1.683,11	1.686,88
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53	1.694,38	1.697,39
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%	99,33%	99,38%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Selain infrastruktur jalan, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, air bersih dan air minum juga menjadi prioritas Pemerintah Kota melalui BUMD PDAM Surya Sembada. Hal ini penting dilaksanakan dalam rangka

mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak untuk seluruh warga Surabaya. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, air minum dan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Air Minum Layak di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (%)	97,57%	97,85%	97,97%	98,10%	98,27%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak (%)	99,56%	99,6%	99,54%	99,48%	99,12%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih (%)	95,51%	96,38%	98,97%	99,90%	99,46%

Sumber: Dinas Sosial dan PDAM Surya Sembada, 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penduduk dengan akses air bersih sejak tahun 2016 terus meningkat hingga tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh banyaknya pembangunan kawasan permukiman penduduk yang status pengelolaannya masih milik pengembang, sehingga PDAM Surya Sembada tidak dapat melakukan intervensi lebih jauh.

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2020, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	<i>(sedang disusun di 2021)</i>
14. Masterplan Persampahan	<i>(akan disusun di 2023)</i>
15. Masterplan Industri	<i>(akan disusun di 2023)</i>
16. Strategi Sanitasi Kota	<i>(akan disusun di 2022)</i>
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	<i>(akan disusun di 2022)</i>
18. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	<i>(akan disusun di 2022-2026)</i>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya *Single Window* (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Penerbitan IMB Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tinggal (IMB)	7.186	7.663	5.443	6.522	5.787
2	Non Rumah Tinggal (IMB)	1.758	3.581	1.983	2.167	1.892
3	Reklame (IMB)	1.719	1.659	1.757	456	437
Total (IMB)		10.677	11.014	8.453	8.123	8.027

Sumber: DPRKPKTR, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penurunan jumlah penerbitan IMB reklame mulai tahun 2019 disebabkan karena penerbitan IMB reklame cukup dilakukan sekali per bangunan reklame, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal ini bertujuan untuk semakin memudahkan dan mengefisienkan pelayanan perizinan IMB reklame.

Tabel 2.20 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bangunan yg dikenakan sanksi administratif (persil)	19 persil	22 persil	29 persil	9 persil	401 persil

Sumber: DPRKPKTR, 2020

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin berkurangnya jumlah persil yang melanggar izin di tahun 2019. Meski demikian, sampai dengan pertengahan tahun 2020, dengan meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka usaha penertiban yang lebih baik telah dilaksanakan, dibuktikan dengan adanya 401 persil yang dikenakan sanksi administrasi.

Karena bagaimana pun, seiring dengan penerbitan izin tersebut harus diikuti oleh pengawasan agar sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

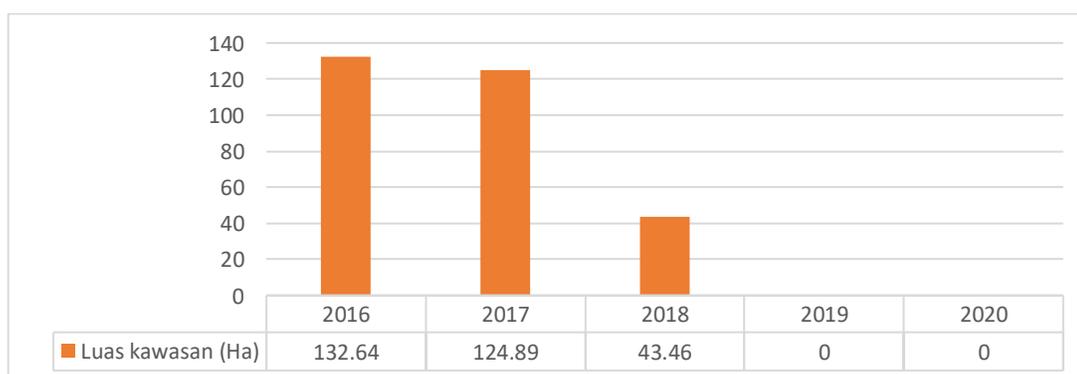
Tabel 2.21 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan (prioritas)
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan (prioritas)	
6	Rungkut	Rungkut Kidul		
7	Rungkut	Kalirungkut		
8	Semampir	Wonokusumo		
9	Semampir	Sidotopo		
10	Gubeng	Airlangga		PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari		
12	Pakal	Benowo		
13	Simokerto	Tambakrejo		
14	Sukomanunggal	Putat Gede		
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari		
16	Krembangan	Morokrembangan	PRIORITAS III	
17	Asemrowo	Asemrowo		
18	Bubutan	Bubutan		
19	Bubutan	Gundih		
20	Bulak	Kenjeran		
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak		
22	Semampir	Sidotopo		
23	Tandes	Tandes		
24	Wonokromo	Darmo		
25	Krembangan	Dupak		
26	Tandes	Karangpoh		

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Sedangkan perkembangan luas kawasan prioritas, yang ditetapkan melalui SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015, dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14 Perkembangan Luas Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Dari grafik di atas, luas kawasan prioritas berhasil ditingkatkan kualitasnya hingga semua kawasan tersebut memiliki kualitas permukiman yang sesuai standar. Meski demikian, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tetap harus dilakukan guna meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Sejak tahun 2016 hingga 2018, jumlah rumah yang diperbaiki selalu meningkat. Hanya di tahun 2019 mengalami penurunan karena jumlah rumah tidak layak huni yang bisa diintervensi lebih sedikit (1100 unit) dibandingkan dengan tahun 2018 (2019 unit). Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah rumah yang diperbaiki terjadi karena Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dan keluarga penerima manfaat membatasi aktivitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (unit)	749	1.629	1.648	1.090	461

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

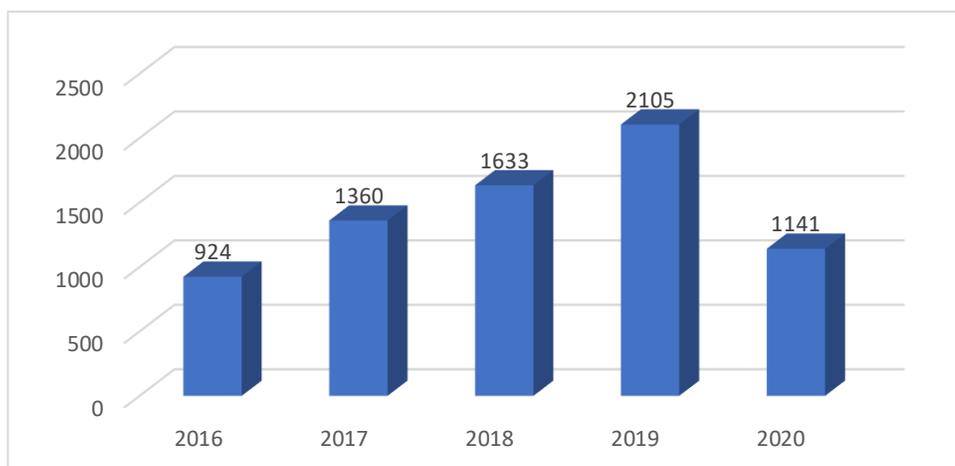
Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
 - Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
 - Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.
- Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community-based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya

telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2019, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 96 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 19 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa Beroperasi Tahun 2020

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m ²)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41.044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m ²)	Keterangan
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	2	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBD)
17	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBD)
			36	2		Dibangun 2018 (APBD)
18	Pondok Benowo	Babat Jerawat, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
19	Indrapura	Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
Total				99		

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Polisi Pamong Praja (orang)	648	663	677	781	781
2	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (rasio)	2,14	2,15	2,18	2,47	2,62

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya

telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.255 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggar. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.25 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (pelanggaran)	47.067	41.111	24.095	16.382	5.274
2	Jumlah pelanggaran K3 (pelanggaran)	47.067	41.111	24.095	16.382	5.274
3	Persen penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 65 personil Linmas. Sedangkan pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 66 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016–2020**

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas (personil)	24.859	19.372	20.033	20.641	19.584
2	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk (rasio)	82,41	63,00	64,73	65,33	65,92

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.27 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016–2020**

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	57	64	74	86	86
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	93%	93%	93%	94%	94%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab utama bencana kebakaran. Sebagai contoh, penyebab kebakaran di tahun 2020, dari total 617 kejadian, terdapat 377 kejadian yang sudah diketahui penyebabnya. Dari sumber api terbuka, sebanyak 220 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang di buang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik, sebanyak 157 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28 Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hubungan Listrik (kejadian)	142	114	107	75	157
2	Api Terbuka (kejadian)	125	239	301	186	220
3	Api Mekanis (kejadian)	3	0	4	0	0
4	Dalam Penyelidikan (kejadian)	30	234	70	254	241
5	Tidak Ada Keterangan (kejadian)	0	2	14	0	0
Total (kejadian)		300	589	496	515	617

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2016-2020, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 Menit (kejadian)	300	589	496	515	617
2	Jumlah Kejadian Kebakaran (kejadian)	300	589	496	515	617

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2020

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel 2.30 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang ada (Jiwa)	50.222	47.633	58.129	77.808	73.176
2	Jumlah PMKS yang ditangani (Jiwa)	30.468	28.643	36.098	46.765	44.435
3	Persentase PMKS yang ditangani (%)	60,67	60,13	62,09	60,10	60,72
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
5	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk (%)	1,66	1,55	1,88	2,46	2,46

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PMKS di tahun 2020 menurun dari 77.808 orang menjadi 73.176 orang, dengan persentase PMKS yang ditangani sebanyak 60,72 persen. Meski persentase penanganan tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2019, namun persentase PMKS terhadap jumlah penduduk cenderung tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya usaha yang lebih untuk dapat menurunkan rasio jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk, meskipun ada jenis PMKS yang secara status memang tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap. Mereka semua tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PMKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PMKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PMKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31 PMKS Penduduk non Surabaya

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS non Surabaya (orang)	N/A	1.609	650	669	1.137

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2020

Keterangan: Data 2016 tidak tersedia karena belum dilakukan pencatatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PMKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 PSKS Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Total PSKS (PSKS)	2.587	1.462	3.312	1.551	1.090
PSKS Aktif (PSKS)	N/A	771	970	1.016	645

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Keterangan: Data PSKS Aktif 2016 tidak tersedia karena belum ada pencatatan

Selain itu, tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1.017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09% yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet di atas 1 juta atau sebesar 82,68%. Tahun 2019 terdapat 190 PMKS yang dilatih dan dalam masa belajar untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat 23 yang didampingi. data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif (keluarga)	1.824	695	464	190	23

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan produktivitas total daerah.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita. Selengkapnya diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.34 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018–2020

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan (Juta Rp)	%	Non Makanan (Juta Rp)	%		
2018	776.984,53	40,94	1.120.876,41	59,06	1.897.860,94	100
2019	742.013,05	36,60	1.285.586,12	63,40	2.027.599,17	100
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

2.4.1.2 Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017–2020

Uraian (Satuan)	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (orang)	1.495.837	1.546.963	1.590.651	1.582.564
PDRB (Juta Rp)	493.026.305	538.845.465	580.488.529	554.509.457
Produktivitas (Juta per orang)	329,60	348,32	364,94	350,39

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2020

Sejak tahun 2017 hingga 2019, produktivitas ekonomi per kapita angkatan kerja di Surabaya selalu meningkat, mencapai 364,94 juta per kapita. Namun akibat pandemi di tahun 2020, nilai ini menurun menjadi 350,39 juta per kapita.

2.4.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

2.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota. Indeks ini juga digunakan untuk menunjang pemantapan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari Indeks Kebinamargaan dan Pematusan; Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan; serta Indeks

Penyelenggaraan Transportasi. Evaluasi capaian Indeks Infrastruktur Kota didapatkan dari 40% bobot Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, 30% Indeks Keciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta 30% Indeks Penyelenggaraan Transportasi. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020. Adapun capaian Indeks Infrastruktur Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 0,6.

Indeks Kebinamargaan dan Pematusan merupakan indikator komposit yang tersusun atas:

a. Indeks Bina Marga, diukur melalui 3 indikator, yakni:

- 1) Persentase jalan dalam kondisi baik
- 2) Tingkat konektivitas jalan
- 3) Persentase ketersediaan prasarana pejalan kaki

b. Indeks Pematusan, diukur dengan 3 indikator, yaitu:

- 1) Persentase prasarana drainase berfungsi dengan baik
- 2) Persentase pompa siap operasional
- 3) Persentase penurunan luas genangan

Adapun capaian indeks Kebinamargaan dan Pematusan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,748 yang didapat dari rata-rata dari capaian indeks bina marga sebesar 0,68 dan capaian indeks pematusan sebesar 0,82.

Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah indikator yang terdiri dari:

a. Indeks Keciptakarya, diukur melalui 4 indikator keciptakarya yang meliputi:

- 1) Penyediaan rumah layak huni
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman
- 3) Penanganan penyerahan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota

b. Indeks Penataan Ruang, diukur melalui 2 indikator, yakni:

- 1) Implementasi perencanaan tata ruang
- 2) Pelayanan pemanfaatan ruang
- 3) Pendataan pelayanan pemanfaatan ruang
- 4) Persentase bangunan ber-IMB

c. Indeks Pertanahan, diukur melalui jumlah luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum.

Adapun capaian Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,329 yang didapatkan dari rata-rata terbobot (*weighted average*) dari capaian indeks keciptakarya sebesar 0,035 (bobot 50%); indeks penataan ruang sebesar 0,282 (bobot 40%); indeks pertanahan sebesar 0,012 (bobot 10%).

Sedangkan Indeks Penyelenggaraan Transportasi merupakan indikator yang tersusun atas komponen nilai *load factor* angkutan umum, *v/c ratio*, dan konektivitas jaringan transportasi. Adapun capaian indeks ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,673.

2.4.2.2 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

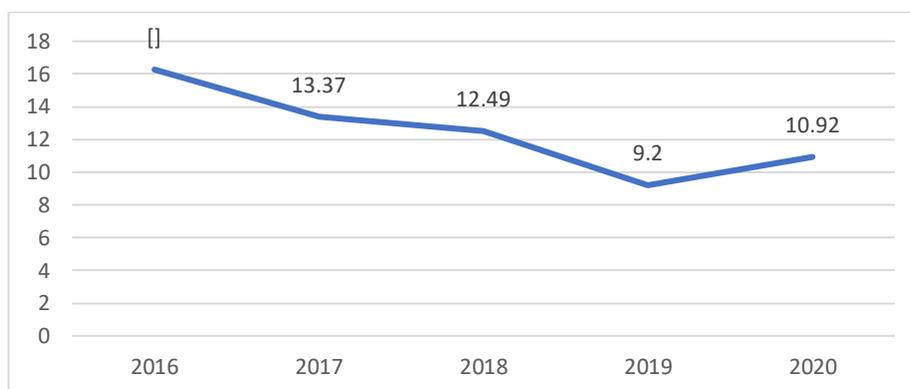
Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan, namun sedikit meningkat pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,43 menit. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,01 menit, dan pada tahun 2020, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,22 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	22,43	22,01	22,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

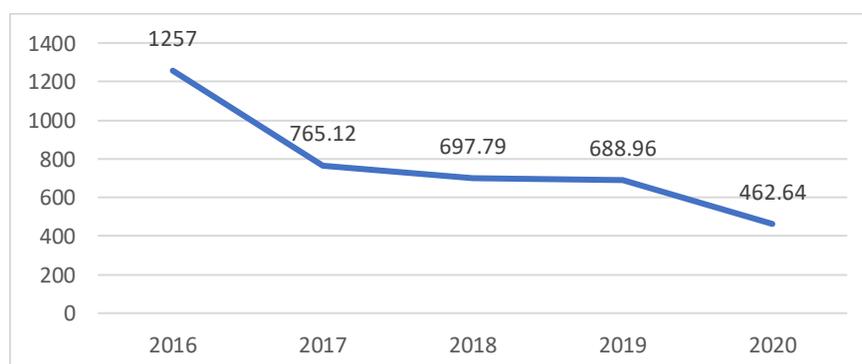
Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 12,49 cm. Tahun 2019, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 9,20 cm, dan tahun 2020, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 10,92 cm sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 2.16 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Sedangkan pada tahun 2019, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 688,96 ha, dan pada tahun 2020, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 462,64 ha sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 2.17 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan genangan air, telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun *boezem-boezem* kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh)

rumah pompa, yaitu pada Pompa *Boezem* Kalidami, Pompa *Boezem* Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematuan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

2.4.2.3 Analisis Kinerja Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel 2.37 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (%)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2020

Tabel 2.38 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel di atas, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel 2.39 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2020

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.4.2.4 Aksesibilitas Perhubungan

Dari tahun ke tahun, aksesibilitas perhubungan secara umum dapat dikaitkan dengan kapasitas jalan dalam menampung jumlah kendaraan yang lalu lintas di Kota Surabaya. Untuk melihat kinerja tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur tingkat/derajat kejenuhan lalu lintas atau yang bisa disebut V/C Rasio. Data V/C Rasio di beberapa jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya
Tahun 2018-2020**

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	V/C Rasio (rasio)		
			2018	2019	2020
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,30	0,28
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,40
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,40
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,50
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28
10	Jl. Diponegoro	nasional	0,51	0,44	0,42
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42
12	Jl. Dr. Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42
13	Jl. Embong Malang	nasional	0,52	0,37	0,44
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48
16	Jl. Gubeng pojok	nasional	0,73	0,34	0,47
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17
19	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,20	0,18
20	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83
21	Jl. Jagir Wonokromo	nasional	0,32	0,29	0,18
22	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,60
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22
24	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,01	0,01
25	Jl. Kayun	kota	0,43	0,23	0,23
26	Jl. Kedung Doro	kota	0,29	0,23	0,27
27	Jl. Kejawen Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49
31	Jl. Laguna Kejawen Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22
32	Jl. Mayjend HR Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44
35	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,50
36	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11
37	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	V/C Rasio (rasio)		
			2018	2019	2020
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16
41	Jl. Prof. Dr. Mustopo	kota	0,75	0,66	0,72
42	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83
43	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19
44	Jl. Stasiun Wonokromo	nasional	0,51	0,29	0,50
45	Jl. Sumatera	nasional	0,55	0,52	0,37
46	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55
48	Jl. Jendral Basuki Rahmat	kota	1,34	1,18	1,38
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl.Veteran	kota	0,95	0,86	1,01
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05
Rata-rata kota (rasio)			0,56	0,55	0,48
Rata-rata total (rasio)			0,56	0,54	0,47

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

2.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2015, jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang sebanyak 79.404. Kemudian Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 bertambah sebanyak 5.380 titik. Pada tahun 2018, PJU yang terpasang bertambah 5.372 titik, sedangkan pada tahun 2019 PJU yang terpasang bertambah 6.090 titik. Dan pada tahun 2020 PJU yang terpasang kembali bertambah 6.400 titik. Sehingga, dengan demikian sampai dengan tahun 2020 jumlah titik PJU sebanyak 107.939 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel 2.41 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru di Tahun 2016–2020

Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.293	5.380	5.372	6.090	6.400

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/konservasi energi kota.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Indeks Harmoni Sosial

Dalam rangka mendukung dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, diperlukan kesatuan dalam keberagaman masyarakat di Kota Surabaya. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah konflik dan utamanya mencegah tindakan anarkis yang dapat merugikan para pemodal yang mengembangkan bisnisnya di Kota Surabaya. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020.

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (5) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi

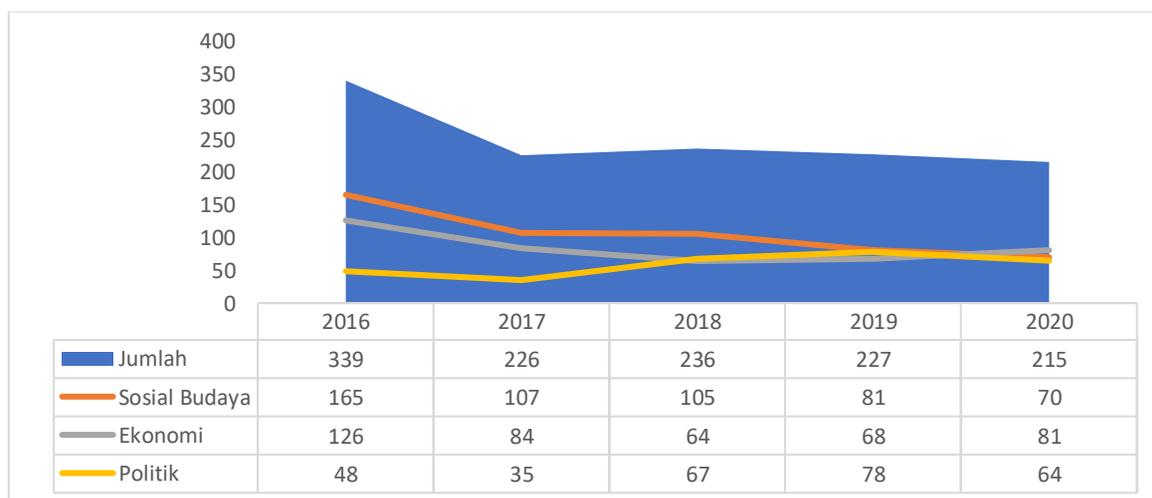
masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Adapun capaian Indeks Harmoni Sosial pada tahun 2020 sebesar 73,99 merupakan hasil rata-rata terbobot dari nilai indeks budaya lokal sebesar 88,56 (bobot 35%); indeks kapasitas pengelolaan lingkungan sebesar 39,49 (bobot 30%); dan indeks kepedulian sosial sebesar 89,00 (bobot 35%).

2.4.3.2 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, diperlukan adanya ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, diperlukan penanggulangan bencana yang baik disertai dengan kondisi ketentraman dan ketertiban kota yang kondusif. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban merupakan gabungan dari komponen Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota (Indeks Trantib) serta Indeks Penanggulangan Bencana (Indeks PB). Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020.

Indeks ketentraman dan ketertiban kota didapatkan dari persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan serta persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya) yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pada tahun 2020, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan sebesar 65,68 persen, sedangkan persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sebesar 95,35 persen.



Gambar 2.18 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016–2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Berdasarkan gambar di atas, jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 kembali menurun, serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Sedangkan indeks penanggulangan bencana diukur melalui 4 komponen, yakni: (1) persentase waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana maksimal 24 jam, (2) persentase kelurahan tangguh bencana, (3) indeks pencegahan kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk, dan (4) persentase waktu tanggap kejadian kebakaran maksimal 15 menit. Pada tahun 2020, capaian Indeks Penanggulangan Bencana Kota Surabaya sebesar 0,732.

Adapun capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2020 sebesar 0,768 merupakan hasil rata-rata dari indeks ketentraman dan ketertiban kota dengan indeks penanggulangan bencana.

2.4.3.3 Perizinan

Seperti disajikan pada tabel di bawah, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel 2.42 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No.	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan (perda)	1	0	0	1	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa (perda)	0	0	1	0	0

3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan (perda)	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---

Sumber: Bagian Hukum, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Angkatan Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas angkatan kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan D4/S1 (orang)	325.755	328.211	303.549	305.315	303.410
2	Jumlah lulusan S2 (orang)	21.579	22.091	21.01	21.363	21.179
3	Jumlah lulusan S3 (orang)	1.279	1.315	1.353	1.376	1.405
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 (orang)	348.613	351.617	325.912	328.054	325.994
5	Jumlah penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3 (%)	0,116	0,114	0,105	0,104	0,109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016–2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun (jiwa)	717.636	713.916	672.334	700.826	688.478
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun (jiwa)	220.340	232.830	216.158	229.491	186.272
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (jiwa)	937.976	946.746	888.492	930.317	874.750
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	2.369.324	2.395.881	2.206.240	2.229.164	2.095.980
6	Rasio ketergantungan (%)	0,396	0,395	0,402	0,417	0,417

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 22,50 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 6,27 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,55 persen. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,417 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

Surabaya merupakan pusat ekonomi, bisnis dan perdagangan terbesar di Jawa Timur ditunjang dengan fasilitas pendukung seperti Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai kota metropolis, Surabaya memiliki eskalasi permasalahan dan tantangan pembangunan yang kompleks dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kontraksi ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjadi penentu dalam identifikasi permasalahan mengingat Surabaya sebagai kota perdagangan dan industri serta jasa pasti menerima dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang bertumpu pada sektor primer.

3.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Surabaya dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut merupakan permasalahan pembangunan secara umum:

1. Perlunya penanganan dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat bencana nasional pandemi Covid-19
2. Belum optimalnya pemenuhan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja.
3. Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata.
4. Masih kurang optimalnya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak.
5. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.
6. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang.

7. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perkotaan serta perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
8. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
9. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular.
10. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan *stunting*.
11. Masih perlunya peningkatan ketahanan pangan dan tingkat keamanan pangan masyarakat.
12. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.
13. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum.
14. Masih kurang optimalnya pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal.
15. Masih perlunya pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.
16. Belum optimalnya pengadaan, pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

Dari permasalahan umum tersebut, berikut penjabaran permasalahan dan tantangan masing-masing urusan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK
- Masih belum meratanya kualitas sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kota Surabaya.
- Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi

- Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.
- Kurangnya partisipasi peserta didik dalam menuntaskan pendidikan kesetaraan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
- Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan standarnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan standarnya.
- Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal.
- Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi.
- Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain : Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll.
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan.

- Masih diperlukan penyusunan Rencana Induk pada beberapa sektor yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
- Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal.
- Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta.
- Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota.
- Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal.
- Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternatif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Penyediaan kapasitas rumah susun belum sebanding dengan jumlah pemohon/calon penghuni rumah susun.
- Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman.
- Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni.
- Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi.
- Meningkatnya potensi bencana/bahaya kebakaran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta aktifitas pada kawasan permukiman, perdagangan, dan industri.
- Meskipun di Kota Surabaya kawasan kumuh telah relatif tidak ada, namun pengembangan kualitas lingkungan permukiman tetap harus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
- Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat
- Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani).

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Perlunya pemutakhiran dan validasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi, agar bantuan sosial tepat sasaran.
- Masih ditemukannya PMKS yang bukan penduduk Kota Surabaya.
- Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid- 19.
- Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran.
- Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.
- Kurangnya soft skill tenaga kerja lokal Surabaya dalam dunia kerja.

- Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja.
- Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama).

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
- Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan.
- Belum optimalnya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Masih perlunya pengadaan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.

- Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
- Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.
- Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi.
- Menurunnya kualitas air bersih di Kota Surabaya antara lain disebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan air baku.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Masih adanya penduduk lahir dan penduduk meninggal yang belum dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran/akte kematian.
- Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online.
- Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB, tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need) serta peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
- Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
- Sulitnya pengendalian penduduk non permanen yang berasal dari luar daerah karena tingkat mobilitas yang tinggi.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

- Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya.
- Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro.
- Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM.
- Masih ada koperasi yang belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi.
- Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.
- Kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Masih perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa.
- Perlunya peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan non perizinan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat.

- Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk.
- Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta dalam satu aplikasi yang tervalidasi dan terintegrasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal.
- Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil.
- Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.
- Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.

- Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi Covid-19.
- Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.
- Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan terutama pada saat pandemi Covid-19.
- Masih kurang optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan.
- Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Masih adanya usaha mikro yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.
- Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.
- Kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional terutama yang dikelola oleh PD Pasar.

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

- Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam

menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.

- Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
- Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah.
- Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.
- Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar.

Perencanaan

- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Keuangan

- Masih adanya piutang pendapatan daerah yang belum tertagih.
- Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan.
- Belum optimalnya pendapatan dari Dana-Dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.
- Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena dampak Covid-19.
- Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

Kepegawaian

- Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir.

Pendidikan Dan Pelatihan

- Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai.

Inspektorat Daerah

- Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
- Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

Penelitian Dan Pengembangan

- Adanya perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan pembangunan perkotaan yang secara terus menerus dan mengikuti perkembangan, sehingga dibutuhkan penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan.

Kesatuan Bangsa Dan Politik

- Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis Pembangunan Kota Surabaya merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

3.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Komitmen Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial serta kesetaraan sebagai salah satu tujuan pembangunan, sehingga konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000

mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan,

memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragamanhayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah kota Surabaya telah melakukan kajian *Voluntary Local Review* (VLR) pertama di Indonesia melalui surat minat Walikota Surabaya Nomor: 190/11576/436.2.3/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 kepada UNESCAP. Dalam melakukan kegiatan ini Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan tim konsultan UCLG ASPAC dengan mengambil tema “*Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Pasca Pandemi yang Tangguh*”.

Dari hasil kajian tersebut didapatkan 9 prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Surabaya yaitu:

1. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
2. Pendidikan Berkualitas
3. Kesetaraan Gender
4. Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
6. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
7. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
8. Ekosistem Darat
9. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

3.2.2 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak

sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri di setiap negara pada keseluruhan sistem.

Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analisis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini.

Saat masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan. Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era

ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “re-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat.

Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul khususnya Kota Surabaya.

3.2.3 Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai.

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara-negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Kota Surabaya harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kota Surabaya adalah ibu kota bagi Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Surabaya dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

3.2.4 Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)

Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan

pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan harus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain: pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

3.2.5 Kebijakan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - Transformasi Struktural
 - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Ketimpangan antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - Pemenuhan layanan dasar
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - Pengentasan kemiskinan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
 - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
 - Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
 - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
 - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
 - Belum optimalnya peran keluarga
 - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
 - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
 - Keselamatan dan keamanan transportasi
 - Ketahanan kebencanaan infrastruktur
 - Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
 - Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
 - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
 - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Konsolidasi demokrasi
 - Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - Penegakan hukum nasional
 - Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - Menjaga stabilitas keamanan nasional

3.2.6 Kebijakan Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan :

1. Pemenuhan prinsip dasar perubahan sebagai berikut :
 - Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat;
 - Perubahan pola pikir (*mindset*) dimulai dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan birokrasinya;
 - Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat;
 - Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas;
 - Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan;
 - Peningkatan jiwa kewirausahaan;

- Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan
- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:

- Dunia usaha meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global;
- Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;
- Pemerintah didukung oleh kemudahan birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;
- Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha;
- Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan non-perizinan sebagai fasilitas kemudahan berusaha;
- Pemerintah memberikan komitmen nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang handal;
- Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial;
- Bentuk usaha pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan manajemen yang berasaskan inklusivisme dan keberlanjutan; dan

- Mendorong integrasi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

3. Penguatan Konektivitas Antarwilayah

- Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
- Identifikasi simpul-simpul transportasi (*transportation hubs*) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
- Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

4. Optimalisasi Pusat Kegiatan Ekonomi

Optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur.

5. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

6. Pemanfaatan Potensi Kemaritiman

- Pemanfaatan posisi strategis maritim Provinsi Jawa Timur untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi Provinsi Jawa Timur;
- Pemanfaatan potensi jalur laut untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional dan regional; dan
- Peningkatan daya saing jalur laut internasional dan kemaritiman bangsa dengan memanfaatkan jalur Sea Line of Communication (S Log dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dimiliki.

7. Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

Ketahanan pangan :

- Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
- Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
- Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
- Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;
- Pembangunan kegiatan investasi pangan baru berskala ekonomi Luar Jawa; dan
- Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Ketahanan Air :

- Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;
- Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;

- Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air; dan
- Kabupaten/Kota memastikan tercipta/terjaganya luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.

Ketahanan Energi :

- Manajemen resiko didasarkan pada pengaturan komposisi energi (*energy mix*) yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;
- Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;
- Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut didalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor;
- Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan;
- Memitigasi ketergantungan energi Indonesia (terhadap impor minyak) yang kemudian membebani APBN dengan mendorong pengembangan energi terbarukan;
- Mendorong pemanfaatan sumberdaya energi yang ketersediaannya cukup banyak (batubara) atau energi yang terbarukan;
- Mengembangkan strategi kebijakan harga energi yang mendorong upaya-upaya efisiensi energi dan diversifikasi energi, khususnya ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
- Mendorong efisiensi pemanfaatan dan diversifikasi energi pada pembangkit listrik dan terutama sektor-sektor dengan konsumsi energi tinggi.

8. Prinsip Keberlanjutan dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

- Mengusahakan pengurangan resiko bencana, seperti dengan melakukan bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia;
- Penyesuaian perencanaan infrastruktur dan desain terhadap dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim sebagai bentuk penguatan adaptasi bangsa;
- Pengembangan ekonomi rendah emisi karbon (*low carbon economy*) sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serendah mungkin;
- Pengembangan kapasitas dan peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia; dan
- Memastikan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan agar memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi emisi GRK serta untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim.

Kota Surabaya sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, turut mendukung dalam penguatan infrastruktur untuk konektivitas antara daerah. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas tersebut berupa pembangunan transportasi publik Kawasan Prioritas Gerbangkertsusila (Surabaya Regional Railway Line dan LRT Surabaya). Selain itu pembangunan flyover dan jalur KA menuju Pelabuhan Teluk Lamong serta pembangunan jalan tol Bandara Juanda – Pelabuhan Tanjung Perak.

3.2.7 Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (New Normal)

Dampak Covid-19

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat

telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan Covid-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan, institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter, bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad.

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan

pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (supply chain) dari pihak luar negeri yang belum recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu: (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga

meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

3.2.8 Isu Strategis Jawa Timur

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJABERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan
2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
3. Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi
4. Demokrasi kewargaan
5. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3.2.9 Isu Strategis Kota Surabaya

Isu strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Surabaya pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Isu strategis Kota Surabaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan bermartabat.
 - Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.
 - Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.
 - Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 - Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
 - Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
 - Penumbuhan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 - Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Covid-19.
 - Penguatan ketahanan dan keamanan pangan.
 - Pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya urban farming.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif
 - Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan usaha mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
 - Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.

- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 - Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
 - Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
 - Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui startup bisnis, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.
3. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System*)
- Pemantapan infrastruktur yang ramah lingkungan pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.
 - Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan transportasi barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi.
 - Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - Pengembangan *eco-energy* untuk sarana prasarana publik.
 - Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
 - Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Makam, dll) yang berkualitas dan merata.
 - Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku Umbulan sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.

- Percepatan pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
 - Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
 - Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
- Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti diskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
 - Membangun sistim keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
 - Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadaman kebakaran, pos tanggap darurat dan lain sebagainya.

3.3. Tantangan

Masyarakat perkotaan yang lebih dinamis dengan cepat menangkap perkembangan informasi dan responsif terhadap dinamika permasalahan yang terus menerus berkembang, merupakan tantangan tersendiri bagi

Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan dengan berbagai kreatifitas dan inovasi mengikuti perkembangan kota.

Dengan pesatnya perkembangan kota Surabaya diikuti dengan pengaruh dan dampak perkembangan teknologi yang semakin cepat dan sulit diprediksi, membuat masyarakat kota memiliki tuntutan dan aspirasi yang semakin meningkat dan beragam.

Minimnya sumber daya alam di kota Surabaya sebagai tantangan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang lain, sehingga Pemerintah Kota Surabaya harus mendorong berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengembangan Kota Surabaya.

Letak kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur menjadi tujuan warga diluar Surabaya untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain di kota Surabaya, ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya karena tidak hanya memberikan fasilitas ke warga Surabaya saja, namun juga warga luar Surabaya yang beraktifitas disini.

Beragamnya penduduk di kota Surabaya mulai dari latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya menimbulkan adanya ketimpangan wilayah. Untuk meminimalkan hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pemerataan pembangunan dengan mengupayakan berbagai program dan inovasi guna meningkatkan wilayah-wilayah prioritas untuk lebih berdaya masyarakatnya dan mengikuti dinamika perkembangan kota. Agar semua masyarakat memiliki peran aktif meskipun latar belakang pendidikan maupun sisi lainnya masih tertinggal. Diharapkan warga kota Surabaya tidak hanya menjadi penonton atas perkembangan kota yang semakin pesat atau bahkan tergusur akibat pembangunan, namun Pemerintah Kota Surabaya berupaya agar semua warga dapat menikmati hasil pembangunan atau perkembangan kota. Hal tersebut tentu diiringi dengan kegiatan dan program yang inovatif dan kreatif yang dapat memberdayakan seluruh elemen masyarakat.

3.4. Peluang

Sinergi Pentahelik (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan media) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota merupakan peluang yang sangat dominan bagi keberhasilan pengembangan inovasi selanjutnya. Dari masing-masing elemen tersebut dapat mengeluarkan kreatifitas yang saling melengkapi sehingga tujuan pembangunan dapat lebih mudah terwujud.

Kebijakan dan program-program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya dapat memunculkan inovasi untuk pengembangan kota selanjutnya atau bahkan sebagai pemicu munculnya daya kreatifitas elemen masyarakat lainnya.

Dari sektor dunia usaha yang lebih mengetahui kebutuhan pasar dan perkembangan informasi produk, selalu menggunakan inovasinya agar terus bertahan dan berhasil memasarkan produknya.

Dinamika perkembangan masyarakat dan hasrat memenuhi kebutuhan hidupnya membuat masyarakat perkotaan lebih kreatif dan inovatif agar bisa bertahan di kota besar.

Lembaga pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan selalu dinamis mengikuti perkembangan sehingga berbagai hasil penelitian yang inovatif muncul dari pihak akademisi. Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, hal ini sebagai peluang yang sangat bagus dalam mendukung pengembangan inovasi di kota Surabaya. Berikut daftar perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya:

Tabel 3.1 Daftar Perguruan Tinggi di Kota Surabaya

No.	Nama Perguruan Tinggi	No.	Nama Perguruan Tinggi
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	38	STIE Indonesia
2	Universitas Airlangga (Unair)	39	STIE Mahardhika
3	Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	40	STIE Pariwisata Satya Widya
4	Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN)	41	STIE Perbanas Surabaya.

No.	Nama Perguruan Tinggi	No.	Nama Perguruan Tinggi
5	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	42	STIE Prima Visi
6	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)	43	STIE Urip Sumohardjo
7	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	44	STIE Widya Darma
8	Universitas 45 Surabaya	45	STIE Wilwatikta
9	Universitas Bhayangkara	46	STIE Yapan
10	Universitas Ciputra Surabaya	47	STIKES Surabaya
11	Universitas Dr. Soetomo	48	STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya
12	Universitas Hang Tuah	49	STIKES Insan Unggul Surabaya
13	Universitas Kartini Surabaya	50	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws
14	Universitas Katolik Darma Cendika	51	Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya
15	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	52	Sekolah Tinggi Teknik Cakrawala
16	Universitas Kristen Petra	53	Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
17	Universitas Merdeka Surabaya	54	Sekolah Tinggi Teknik Widya Darma
18	Universitas Muhammadiyah Surabaya	55	STKIP Bina Insan Mandiri
19	Universitas PGRI Adi Buana	56	STMIK Surabaya
20	Universitas Sunan Giri Surabaya	57	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)
21	Universitas Surabaya	58	IKIP Widya Darma
22	Universitas Teknologi Surabaya	59	Institut Informatika Indonesia Surabaya
23	Universitas Tri Tunggal	60	Politeknik NSC Surabaya
24	Universitas W R Supratman Surabaya	61	Politeknik Sakti Surabaya
25	Universitas Widya Kartika Surabaya	62	Politeknik Surabaya
26	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	63	Politeknik Ubaya

No.	Nama Perguruan Tinggi	No.	Nama Perguruan Tinggi
27	Universitas Wijaya Putra, Suarabaya	64	Program Pendidikan Dan Pelatihan Bisnis
28	Universitas Yos Sudarso Surabaya	65	Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia
29	STAI Luqman Al-Hakim (STAIL)	66	Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya
30	STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya	67	Akademi Akupunktur Surabaya
31	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati	68	Akademi Analisis Kesehatan Unmuh Surabaya
32	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman	69	Akademi Bahasa Asing Webb
33	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Satya Widya	70	Akademi Kebidanan Yarsis Surabaya
34	STIE Artha Bodhi Iswara	71	Akademi Keperawatan Yarsis Surabaya
35	STIE Fatahillah	72	Akademi Kuliner Monas Pasifik
36	STIE Ibmt	73	Akademi Perekam Medik Dan Infokes Pena Husada
37	STIE Ieu	74	Akademi Teknik Industri Tekstil Surabaya

Perkembangan informasi tidak lepas dari kontribusi aktif dari media, dengan adanya keterlibatan media dalam aktifitas pembangunan merupakan peluang yang sangat baik, karena melalui media dapat diketahui inovasi-inovasi lain diluar kota Surabaya bahkan di luar negeri yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan kota Surabaya.

Sehingga dengan adanya sinergi pentahelik akan memunculkan kreatifitas dan inovasi yang sangat besar potensinya dalam mendukung pembangunan kota Surabaya.

Selain itu sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, dengan padatnya penduduk yang menghuni kota Surabaya, dapat membuka

peluang pasar yang sangat besar untuk produk-produk kebutuhan masyarakat. Hal ini memicu dunia usaha khususnya untuk terus menerus melakukan inovasi agar dapat memenuhi keinginan masyarakat dan menarik konsumen.

Perkembangan teknologi di kota Surabaya sangat mendukung munculnya inovasi-inovasi baru. Saat ini sebagian besar pelayanan dilakukan berbasis aplikasi, banyak penduduk juga sudah melek internet dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, begitu pula dengan sarana pendukung yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota, berupa titik wifi gratis di taman kota maupun sarana publik lainnya, serta koneksi fiber optik yang menyebar di seluruh kota, menjadi pendukung peningkatan inovasi yang berbasis teknologi.

Hal lain yang mendukung peningkatan inovasi adalah kerjasama dengan pihak lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota, baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang memungkinkan adanya alih teknologi atau penerapan lainnya yang berpotensi memunculkan inovasi baru. Berikut daftar kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya:

Tabel 3.2 Kerjasama Kota Surabaya dengan Daerah Lain di Dalam Negeri dan Luar Negeri

No.	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No.	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
1	Pemerintah Kabupaten Bone	Dalam Negeri	10	Seattle (Amerika Serikat)	Luar Negeri
2	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Dalam Negeri	11	Busan (Korea)	Luar Negeri
3	Pemerintah Kota Medan	Dalam Negeri	12	Kochi (Jepang)	Luar Negeri
4	Pemerintah Kota Metro	Dalam Negeri	13	Monterrey (Mexico)	Luar Negeri
5	Pemerintah Kota Surakarta	Dalam Negeri	14	Guangzhou (Tiongkok)	Luar Negeri
6	Pemkot Tarakan	Dalam Negeri	15	Xiamen (Tiongkok)	Luar Negeri

No.	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No.	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
7	Pemkab Kepulauan Tanimbar	Dalam Negeri	16	Varna (Bulgaria)	Luar Negeri
8	Pemkab Mentawai	Dalam Negeri	17	Kitakyushu (Jepang)	Luar Negeri
9	Pemkab Pesawaran	Dalam Negeri	18	Liverpool (Inggris)	Luar Negeri

Sumber: Bagian Administrasi Kerjasama, 2020

Tabel 3.3 Kerjasama Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
1	Universitas Bhayangkara	Pihak Ketiga	64	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Pihak Ketiga
2	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Pihak Ketiga	65	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Pihak Ketiga
3	Pengadilan Negeri Surabayaaya	Pihak Ketiga	66	STIKES Katolik ST Vincentius A.Paulo Surabaya	Pihak Ketiga
4	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP)	Pihak Ketiga	67	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pihak Ketiga
5	PT. Mitrakarya Multiguna	Pihak Ketiga	68	Universitas Surabaya	Pihak Ketiga
6	Universitas Sebelas Maret	Pihak Ketiga	69	Universitas Surabaya dan CV Muncul Jaya	Pihak Ketiga
7	Universitas Udayana	Pihak Ketiga	70	Universitas Surabaya dan CV Pesona Mandiri	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
8	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Pihak Ketiga	71	Universitas Surabaya dan CV Universal Service	Pihak Ketiga
9	Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Pihak Ketiga	72	Universitas Surabaya dan CV Universal Trading Indonesia	Pihak Ketiga
10	Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Pihak Ketiga	73	Universitas Surabaya dan PT Bersatu Sukses Swadana	Pihak Ketiga
11	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes) Kejaksaan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Surabaya Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Pihak Ketiga	74	Universitas Surabaya dan PT Goldi Asiana Pangan	Pihak Ketiga
12	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	Pihak Ketiga	75	Universitas Surabaya dan PT Ilios Studio Teknologi	Pihak Ketiga
13	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	Pihak Ketiga	76	Universitas Surabaya dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo	Pihak Ketiga
14	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	Pihak Ketiga	77	Universitas Surabaya dan PT Royal Wahana Nusantara	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
15	Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Pihak Ketiga	78	Universitas Surabaya dan PT. Sieto Utama	Pihak Ketiga
16	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pihak Ketiga	79	Universitas Surabaya dan PT Synergi Ultima Nobilus	Pihak Ketiga
17	Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Yayasan Kebun Raya Indonesia	Pihak Ketiga	80	Universitas Surabaya dan PT Untung Bersama Sejahtera	Pihak Ketiga
18	Dewan Pengurus Daerah Persatuan Realestat Indonesia Jawa Timur	Pihak Ketiga	81	Universitas Surabaya dan PT Widaya Inti Plasma	Pihak Ketiga
19	PDAM Surya Sembada Kota Surabaya	Pihak Ketiga	82	Universitas Surabaya dan Yayasan Longying	Pihak Ketiga
20	PDAM Surya Sembada Kota Surabaya	Pihak Ketiga	83	PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.	Pihak Ketiga
21	PT Pelindo Daya Sejahtera	Pihak Ketiga	84	Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas	Pihak Ketiga
22	PT Pelindo Daya Sejahtera	Pihak Ketiga	85	PT. Sentra Komunitas Nusantara	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
23	Politeknik Penerbangan Surabaya, PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia dan PT. Dutagaruda Piranti Prima	Pihak Ketiga	86	PT Batam Teknik	Pihak Ketiga
24	PT. Citilink Indonesia	Pihak Ketiga	87	PT. Paragon Technology and Innovation	Pihak Ketiga
25	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	Pihak Ketiga	88	Lion Air Group	Pihak Ketiga
26	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk	Pihak Ketiga	89	Akademi Farmasi Surabaya	Pihak Ketiga
27	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk	Pihak Ketiga	90	Yayasan Sarana Hubungan Harmonis Sejahtera	Pihak Ketiga
28	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT BPD Jawa Timur, Tbk	Pihak Ketiga	91	Sekolah Dasar Muhammadiyah 14 Surabaya	Pihak Ketiga
29	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya	Pihak Ketiga	92	Sekolah Dasar Islam Al Azhar 11 Surabaya	Pihak Ketiga
30	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya	Pihak Ketiga	93	Sekolah Dasar Labschol Unesa Yayasan Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
31	PT. Bank Rakyat Indonesia	Pihak Ketiga	94	Lembaga Kursus dan Pelatihan Institut Pembangunan Airlangga Surabaya	Pihak Ketiga
32	PT. Bank Rakyat Indonesia	Pihak Ketiga	95	Laz Rumah Yatim Arrohman Cabang Jawa Timur	Pihak Ketiga
33	PT. ITS Tekno Sains	Pihak Ketiga	96	Yayasan Perhimpunan Pendidikan Kristen Elyon	Pihak Ketiga
34	PT. PP Properti Suramadu	Pihak Ketiga	97	Yayasan Sejahtera Spins Indonesia	Pihak Ketiga
35	PT. PP Properti Suramadu	Pihak Ketiga	98	Sekolah Dasar Nation Star Academy	Pihak Ketiga
36	PT Pertamina (Persero)	Pihak Ketiga	99	PT Surya Timur Sakti Jatim	Pihak Ketiga
37	PT Pertamina (Persero)	Pihak Ketiga	100	Lembaga Bimbingan Belajar Airlangga Sosial Eksakta	Pihak Ketiga
38	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Pihak Ketiga	101	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	Pihak Ketiga
39	Universitas Airlangga	Pihak Ketiga	102	Yayasan Masjid AL Falah Surabaya	Pihak Ketiga
40	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Pihak Ketiga	103	SD Islam Al Azhar 35 Surabaya	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
	Jawa Timur				
41	Universitas Negeri Surabaya	Pihak Ketiga	104	Yayasan Cahaya Harapan Bangsa	Pihak Ketiga
42	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pihak Ketiga	105	Yayasan Pendidikan Generasi Rajawali	Pihak Ketiga
43	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Pihak Ketiga	106	PT Empat Rekan Wacana	Pihak Ketiga
44	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Pihak Ketiga	107	PT Indosat	Pihak Ketiga
45	Politeknik Penerbangan Surabaya	Pihak Ketiga	108	Yayasan Pendidikan Kristen Buah Hati	Pihak Ketiga
46	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Pihak Ketiga	109	Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuli Surabaya	Pihak Ketiga
47	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	Pihak Ketiga	110	Ikatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur	Pihak Ketiga
48	Universitas Brawijaya	Pihak Ketiga	111	Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra	Pihak Ketiga
49	Universitas Gadjah Mada	Pihak Ketiga	112	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	Pihak Ketiga
50	Universitas Indonesia	Pihak Ketiga	113	Yayasan Bina Profesi Indonesia	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
51	Institut Teknologi Bandung	Pihak Ketiga	114	Yayasan Masjid Al Muttaqien	Pihak Ketiga
52	Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pihak Ketiga	115	Yayasan Pendidikan Dharma Vita	Pihak Ketiga
53	Universitas Trunojoyo Madura	Pihak Ketiga	116	Yayasan Pendidikan Kristen Gloria	Pihak Ketiga
54	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII	Pihak Ketiga	117	Yayasan Pendidikan Satya Vidya Indonesia	Pihak Ketiga
55	Universitas Ciputra Surabaya	Pihak Ketiga	118	Yayasan Putera Sampoerna	Pihak Ketiga
56	Universitas Ciputra Surabaya	Pihak Ketiga	119	Yayasan Santa Louisa Perwakilan Surabaya	Pihak Ketiga
57	Universitas Ciputra Surabaya	Pihak Ketiga	120	Yayasan Dana Sosial Al – Falah (YDSF) Surabaya	Pihak Ketiga
58	Universitas Hang Tuah Surabaya	Pihak Ketiga	121	Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 4 Surabaya	Pihak Ketiga
59	STIKES Hang Tuah Surabaya	Pihak Ketiga	122	PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Pihak Ketiga
60	Akademi Kebidanan (Akbid) Griya Husada	Pihak Ketiga	123	PT Surabaya Media Televisi	Pihak Ketiga
61	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	Pihak Ketiga	124	PT Terminal Petikemas Surabaya	Pihak Ketiga
62	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	Pihak Ketiga	125	Institut Teknologi	Pihak Ketiga

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama
				Telkom Surabaya	
63	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	Pihak Ketiga			

Sumber: Bagian Administrasi Kerjasama, 2020

BAB IV

KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Adanya pandemi memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat kota Surabaya, agar kondisi masyarakat lekas pulih Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan berbagai program dan kegiatan dengan diiringi inovasi yang adaptif terhadap kondisi pandemi. Diharapkan seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya mempunyai terobosan atau inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar lebih cepat, efisien dan tepat sasaran.

4.1. Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Dasar Masyarakat

Untuk memastikan bahwa warga kota Surabaya sejahtera dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik. Dalam kaitan kesejahteraan masyarakat di Surabaya, selain ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu aspek penting di dalam pemerintahan. Pemerintah berupaya sangat keras dengan berbagai program yang direncanakan atau sedang berjalan dan tidak lupa pula untuk dipantau dan di evaluasi seberapa efisien dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pendidikan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berisi tentang anggaran bantuan operasional daerah yang diperuntukkan bagi sekolah negeri dan swasta, untuk siswa miskin di jalur mitra warga dibebaskan seluruh biaya sekolah serta mendapatkan bantuan seperti seragam sekolah.

Dalam program ini, Pemerintah Kota Surabaya melakukan sinergi pelayanan perpustakaan umum dengan Kecamatan, RW, Rumah Susun, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Perhubungan, RSUD, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Program dilakukan untuk Pengelolaan Layanan Baca di seluruh Kota Surabaya meliputi Layanan Baca di Perpustakaan Daerah, Layanan Bis Keliling di Sekolah dan Area

Publik, Layanan Paket, Layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Revitalisasi TBM dan Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri.

Dalam hal ekonomi, agar pendapatan keluarga menjadi meningkat, Pemerintah Kota Surabaya menggalak salah satunya Program Pahlawan Ekonomi, program pengembangan potensi komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan yang tersebar di kota Surabaya secara berkelanjutan setiap tahun. Untuk memaksimalkan sebuah keluarga, tidak bisa hanya mengandalkan suami tetapi istri juga harus bisa berperan aktif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya menyusun suatu program dengan mengajak para ibu untuk mencari penghasilan tambahan.

Tidak harus meninggalkan rumah, berkarya bisa dilakukan dimana saja tanpa meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Di antara mereka adalah mantan mucikari dan pekerja seksual dari lokalisasi-lokalisasi yang dibubarkan dan para gelandangan. Di program ini, segala sesuatu dipikirkan secara mendetail. Misalnya, untuk melatih peserta UMKM dalam hal marketing, diadakan lomba berjualan di tingkat kecamatan. Tahap selanjutnya di tingkat kota. Pemenang akan diberi gelar sebagai "Pahlawan Ekonomi".

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan juga melakukan beberapa inovasi layanan agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang baik. Salah satu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan inovasinya melaksanakan e-health, sebuah layanan kesehatan yang berbasis teknologi informasi. Peranan atau fungsi e-health adalah sebagai jembatan komunikasi antara anggota-anggota populasi, profesional di bidang kesehatan, asuransi kesehatan dan lembaga keuangan, penyedia kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan layanan yang memudahkan ini diharapkan akan menghemat waktu proses mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

Dalam penerapannya, e-health dapat diakses dari manapun melalui perangkat komunikasi apapun sepanjang terdapat akses internet. Prinsip

kemudahan menjadi hal utama dalam menyukseskan program e-health. Selain prinsip kemudahan, prinsip ketersediaan juga digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan menyediakan semacam anjungan yang dinamakan sebagai e-kios (kios pelayanan publik), diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai handphone atau peralatan lain untuk mengakses internet.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai pelayanan online baik terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, perizinan, perkantoran SDM, kesehatan, monitoring, pendidikan dan beberapa fasilitas lain terkait dengan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. E-government ini merupakan bagian dari pengembangan teknologi informasi di Surabaya dalam sebuah konsep besar Surabaya Cyber City yang menjadikan Kota Surabaya sebagai kota modern berbasis teknologi informasi.

Kehadiran e-health menjadi solusi terhadap masalah pelayanan kesehatan di Surabaya yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. E-health membuat pelayanan kesehatan pada masyarakat menjadi lebih efisien. E-health menghilangkan sistem antrian pendaftaran secara fisik, pasien dapat mendaftarkan diri secara online untuk mendapatkan kepastian waktu pelayanan darimanapun sepanjang terdapat akses internet. Sistem e-health terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan dan data pasien di puskesmas dan rumah sakit di kota Surabaya. Hal ini tentu saja sangat memudahkan dalam setiap pelayanan terkait dengan pasien dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya.

Diharapkan seluruh aplikasi layanan dasar dapat terintegrasi menjadi sistem informasi terpadu berbasis masyarakat, sehingga dengan adanya pelaporan dari bawah bisa cepat tertangani dan langsung mendapat intervensi dari berbagai bidang.

4.2. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pada UMKM

Pemulihan ekonomi dimasa pandemi maupun pasca pandemi perlu memberikan perhatian khusus pada sektor informal seperti UMKM,

karena sektor inilah yang paling rentan terkena dampak negatif pandemi. Industri Kecil Menengah atau UMKM sebagai salah satu komponen pelaku ekonomi sudah sewajarnya mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa begitu pentingnya peran UMKM dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Pemberdayaan UMKM pada masa pandemi dilakukan melalui optimalisasi penggunaan aplikasi. Aplikasi ini diharapkan sebagai penyedia informasi, pusat layanan terpadu untuk UMKM serta sebagai penghubung antara UMKM dengan industri, dinas terkait dan masyarakat. Aplikasi ini meliputi :

A. Portal UMKM Surabaya

1. Pendataan UMKM
2. Pemetaan UMKM berdasarkan wilayah dan kluster UMKM
3. Info profil UMKM
4. Akses link belanja online untuk produk UMKM di toko online, media sosial, e-marketplace

B. Sistem Pemberdayaan UMKM

1. Informasi program UMKM (seperti pameran / bazar)
2. Program pelatihan / workshop, seperti digital marketing, pembukuan, pemanfaatan media sosial / e-marketplace untuk pemasaran
3. Konsultasi perizinan atau lisensi yang diperlukan
4. Layanan lainnya : peluang ekspor, keuangan dan perpajakan

C. Sistem Pendanaan dan Kemitraan

1. Pengembangan modal melalui fasilitas pembiayaan dari pemerintah, industri (CSR), dan/atau dana dari investor swasta
2. Kemitraan dengan industri

Metode pelaksanaan pengembangan aplikasi UMKM Center mengikuti pembangunan sistem Rapid Application Development dengan urutan pengembangan subsistem Portal UMKM Surabaya, Sistem Pemberdayaan UMKM, Sistem Pendanaan dan Kemitraan, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Requirements Planning*

- Perencanaan
- Pengumpulan kebutuhan

2. *User Design*

- Perancangan data
- Fungsionalitas subsistem
- Desain interaksi

3. *Construction*

- Pembangunan dan pemrograman subsistem berdasarkan prototipe final
- Integrasi unit-unit subsistem
- Pengujian subsistem

4. *Cutover dan Implementation*

- Instalasi
- Implementasi subsistem
- Konversi data
- Pelatihan pengguna

Hasil yang diharapkan dalam pengembangan aplikasi *UMKM Center*, sebagai berikut :

- Masterplan pembangunan aplikasi *UMKM Center*
- Laporan sosialisasi pembangunan aplikasi *UMKM Center* ke stakeholder dan industri
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Spesifikasi kebutuhan untuk portal *UMKM Surabaya*
- Dokumen perancangan Portal *UMKM Surabaya*
- Database *UMKM Surabaya*
- Aplikasi Portal *UMKM*
- Modul pelatihan penggunaan Portal *UMKM Surabaya*
- Spesifikasi kebutuhan untuk Sistem Pemberdayaan *UMKM* dan Sistem Pendanaan dan Kemitraan
- Dokumen Perancangan Sistem Pemberdayaan *UMKM* dan Sistem Pendanaan dan Kemitraan

- Aplikasi Sistem Pemberdayaan UMKM dan Sistem Pendanaan dan Kemitraan
- Modul pelatihan penggunaan Sistem Pemberdayaan UMKM dan Sistem Pendanaan dan Kemitraan
- Laporan evaluasi dan perawatan aplikasi *UMKM Center*
- Laporan pengujian integrasi aplikasi *UMKM Center* dengan sistem informasi layanan publik di Surabaya
- Laporan analisa data berdasarkan data *UMKM Center* dan penggunaan aplikasi

4.3. Eksplorasi Potensi Wisata Surabaya

Dalam membantu pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi wisata di Kota Surabaya, mengingat kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Sehingga dengan meningkatnya sektor pariwisata diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

Eksplorasi potensi wisata yang akan dilakukan meliputi pemetaan database potensi wisata, pembuatan virtual map atau virtual tour dan perancangan live virtual tour.

Pemetaan database dilakukan dari pencatatan lokasi-lokasi potensi wisata potensial di seluruh wilayah Surabaya, bertujuan untuk mengumpulkan data objek wisata kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan jenis wisata dan kebutuhan publik. Pemetaan ulang potensi dan database lokasi dari data yang sudah ada maupun data baru serta dilakukan pengkajian kelayakan dan rencana pengembangannya.

Pembuatan virtual map dan virtual tour berupa penggabungan teknologi visualisasi yaitu fotografi dengan teknologi informasi sehingga informasi bisa diolah menjadi aplikasi meliputi lokasi beserta fasilitas pendukung dan akomodasi biasa. Media ini akan digunakan sebagai *virtual tour guide* yang efektif dalam memperkenalkan lokasi wisata, apalagi di masa pandemi bisa menjadi pilihan. Sedangkan live virtual tour menjadi pilihan yang tepat untuk mempromosikan *urban tourism live virtual tour* sekaligus sebagai persiapan pasca pandemi.

Metode pelaksanaan pengumpulan data lokasi *Urban Tourism* di Surabaya dari pimpinan wilayah, dinas terkait dan anggota masyarakat untuk pendataan objek wisata potensial. Kemudian data yang terkumpul akan dimasukkan dalam database untuk dilakukan pemetaan, jadi database ini akan menjadi sumber data utama dalam pembuatan urban map.

Urban map tersebut menjadi panduan dalam merancang *live tour* (fisik maupun online) yang akan menjelajahi opsi-opsi *tourism* yang sudah dipetakan pada urban map. Dalam pelaksanaan *live virtual tour*, para *tour guide* akan berkeliling di sekitar objek wisata dan perjalanannya disiarkan secara live streaming melalui *video conference*. Sambil berwisata *virtual*, para *tour guide* akan memberikan penjelasan mengenai sejarah dan keunikan destinasi urban tourism di Surabaya. Pada tahapan ini juga akan dilakukan pemetaan dan pelaksanaan information outlet pada titik-titik destinasi wisata yang ditentukan dalam urban tourism map.

Berdasarkan database yang telah ada akan dilakukan kajian perancangan teknologi digital gabungan dari data foto dan teknologi informasi yang memungkinkan semua lokasi dan potensi lokasi terinstalasi information machine yang terkoneksi dengan jaringan internet dan memungkinkan menjadi pinpoint pada geomap, sekaligus menjadi materi utama dalam pembuatan virtual tour.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

5.1. Strategi Penguatan SIDA

Strategi yang digunakan untuk penguatan SIDA dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi, yang terdiri atas :

1. Prakarsa Penguatan SIDA

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian pada tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional serta untuk membangun ekosistem bagi berkembangnya inovasi dan bisnis sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

2. Pengembangan Klaster Industri

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing industrial sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

3. Pengembangan Jaringan Inovasi

Strategi ini sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antaraktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, serta pembelajaran sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

4. Pengembangan Teknopreneur

Strategi ini sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi, sosial, serta pengembangan budaya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

5. Pengembangan Pilar-Pilar Kebijakan Tematik

Strategi ini bertujuan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

5.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Arah kebijakan penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan sistem inovasi daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan dibuat dalam beberapa tahap (setiap tahun). Arah kebijakan penguatan SIDA menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI), yaitu:

1. Mengembangkan kerangka umum kebijakan inovasi dan bisnis;
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin); penelitian, pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa); serta kemampuan absorpsi Iptekin dalam industri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik (good/best practice), dan/atau hasil Litbangyasa;
4. Membangun budaya inovasi di daerah;
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan inovasi di daerah;
6. Meningkatkan penyelarasan dengan perkembangan global.

BAB VI

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA

6.1. Fokus Penguatan SIDA

Fokus penguatan SIDA merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI sebagai contoh untuk menyusun fokus program disetiap elemen KKI, berikut beberapa fokus setiap KKI:

1. Elemen 1: Fokus pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis antara lain mencakup:
 - Pengembangan basis data (indikator penting) inovasi dan bisnis;
 - Pengembangan regulasi yang kondusif;
 - Besaran investasi dibidang IPTEKIN;
 - Perbaikan pelayanan publik;
 - Pengadaan pemerintah yang pro bisnis inovatif;
 - Pengembangan infrastruktur dasar inovasi dan bisnis;
 - Pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis.
2. Elemen 2: Fokus penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEKIN atau penelitian dan pengembangan/ kelitbangan serta mengembangkan kemampuan absorpsi IPTEKIN UMKM antara lain:
 - a. Pengembangan dan penguatan kelembagaan IPTEKIN;
 - b. Pengembangan daya dukung IPTEKIN;
 - c. Pengembangan daya absorpsi IPTEKIN UMKM.
3. Elemen 3: Fokus penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik / terbaik, dan / atau hasil kelitbangan, antara lain :
 - a. Pengembangan / penguatan kelembagaan kolaborasi;
 - b. Peningkatan difusi inovasi, praktek baik dan hasil kelitbangan;
 - c. Pengembangan / penguatan pelayanan berbasis teknologi.
4. Elemen 4: Fokus dalam mendorong budaya inovasi antara lain mencakup :
 - a. Pengembangan / penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi;
 - b. Penguatan kohesi sosial;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kreativitas keinovasian;

- d. Pengembangan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - e. Penciptaan usaha baru yang inovatif.
5. Elemen 5: Fokus penumbuhkembangan dan penguatan keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah meliputi :
- a. Penguatan / pengembangan prakarsa terpadu sistem inovasi;
 - b. Pengembangan / penguatan koordinasi kebijakan daerah, dan daerah nasional;
 - c. Pengembangan / penguatan kelembagaan khusus.
6. Elemen 6: Fokus penyelarasan dengan perkembangan global terbagi atas :
- a. Pengembangan kelestarian lingkungan atau prakarsa inovasi / teknologi hijau;
 - b. Pengembangan / penguatan penerapan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan penjaminan kualitas (measurement, standardization, testing, and quality assurance (MSTQ));
 - c. Pengembangan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d. Peningkatan kepedulian isu-isu dan penyelarasan dengan dinamika internasional yang relevan (seperti ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dll);
 - e. Pengembangan regional branding dan/atau posisi global daerah.

6.2. Program Prioritas Penguatan SIDA

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Tabel 6.1 Fokus dan Program Prioritas Kota Surabaya

Fokus/Prioritas	Program	PD
1. Pembukaan lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2. Ciptakan wirausaha baru	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3. Fasilitasi sertifikasi keahlian kerja gratis untuk warga	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. Penguatan kerja sama nasional-internasional untuk program magang anak muda	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5. Revitalisasi pasar tradisional untuk membangkitkan ekonomi rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6. Pengembangan dan fasilitasi sentra-sentra PKL rakyat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
7. Bangun pusat ekonomi kreatif dan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah

Fokus/Prioritas	Program	PD
ekonomi digital	Dan Ekonomi Kreatif	Raga serta Pariwisata
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
8. Fasilitasi UMKM menuju taraf nasional dan internasional	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	Program Pengembangan UMKM	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
9. Pemberian insentif dan bangun sistem pelayanan investasi berkelas dunia	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
10. Bangun 4 mal pelayanan publik mini merata ke seluruh surabaya	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1. Fasilitasi bimbel gratis di balai-balai RW	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2. Pemenuhan fasilitas olahraga dan internet kecepatan tinggi di seluruh sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3. Pemberian BOPDA dan subsidi SD-SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4. Peningkatan kapasitas guru	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5. Peningkatan kesejahteraan guru swasta dan GTT	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6. Pemberian beasiswa kuliah dalam/luar negeri bagi anak kurang mampu, berprestasi dan atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Fokus/Prioritas	Program	PD
7. Pemberian beasiswa pelajar SMA/SMK	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
8. Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
9. Pemberian BPJS kesehatan bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
10. Pemberian pengobatan gratis bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Bhakti Dharma Husada
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
12. Pemberian suplemen gratis bagi lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
13. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan kader posyandu serta pendamping ibu hamil	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
14. Pemberian insentif kader pemantau jentik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
15. Pemberian nutrisi gratis ibu hamil dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16. Tingkatkan jumlah puskesmas rawat inap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Fokus/Prioritas	Program	PD
17. Pemberian tes <i>swab</i> gratis bagi seluruh warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
18. Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan bagi pelaku seni budaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
19. Fasilitasi pembinaan atlet dan olahraga usia muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
20. Revitalisasi fasilitasi seni budaya dan olahraga menjadi berkelas dunia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
21. Pengembangan wisata sejarah, wisata kota dan MICE berbasis pemberdayaan warga	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	Program Pengelolaan Permuseuman	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
22. Fasilitasi dan pemberian advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Program Perlindungan Perempuan	
1. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan manajemen sampah terpadu untuk Surabaya bersih	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
3. Pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, ibu hamil dan lansia	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Fokus/Prioritas	Program	PD
4. Penyediaan tempat penitipan anak (<i>day care</i>) profesional-gratis di kampung dan fasilitas publik	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Pengembangan sistem transportasi terpadu dan modern urai kemacetan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
6. Pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
7. Pavingisasi dan penataan seluruh kampung	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1. Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pemberian program permakanan (makanan bergizi gratis bagi seluruh warga lansia, difabel dan kurang mampu)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31 Kecamatan
3. Pemberian insentif bagi guru ngaji, guru agama dan pegiat keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
4. Pemberian insentif untuk pengurus RT, RW dan LPMK	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Kec. Karangpilang 2. Kec. Semampir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31 Kecamatan
5. Peningkatan kualitas layanan pusat komando 112 respon cepat masalah rakyat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fokus/Prioritas	Program	PD
6. Pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Pemantapan kerukunan antar umat beragama yang menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Peningkatan keamanan kota dengan instrumen teknologi informasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VII

RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan wujud implementasi strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan Sistem Inovasi Daerah, pendanaan dan penanggungjawab.

Dalam rencana aksi SIDA yang perlu dilakukan awal adalah penguatan organisasi SIDA untuk mengkoordinasikan berbagai potensi inovasi dan permasalahan terkait SIDA di Kota Surabaya. Organisasi ini bertugas menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA, mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen rencana strategis, melakukan penataan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA, melakukan penataan unsur SIDA, melakukan pengembangan SIDA, mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Sistem pendanaan SIDA ini juga perlu segera diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga berbagai upaya pengembangan dapat segera berjalan. Selain itu, perlu diupayakan pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana aksi selanjutnya adalah sosialisasi dan promosi SIDA dalam bentuk kegiatan kompetisi yang untuk OPD dan Masyarakat umum, kegiatan ini perlu dilakukan dari tingkat instansi pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, LSM serta masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi menyangkut berbagai hal mengenai SIDA, target tahunan yang direncanakan, serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya sehingga tiap pihak mampu mengetahui peran

serta dan tanggungjawab untuk memacu suksesnya inovasi di Kota Surabaya.

Adapun tema kegiatan kompetisi dan rencana aksi penguatan SIDA Kota Surabaya dapat dirinci sebagai berikut:

- Tahun 2021, mengusung tema “Inovasi dalam Rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial, tema ini memang menjadi focus utama dalam era Pandemi Covid-19 yang masih memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan social.
- Tahun 2022, mengusung tema “Inovasi dalam rangka pemulihan ekonomi”, tema ini diangkat guna merangsang semangat masyarakat kota Surabaya untuk bahu-membahu dalam rangka keluar dari pandemi dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dengan inovasi-inovasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
- Tahun 2023, mengusung tema “Inovasi dalam rangka peningkatan ekonomi inklusif dan *blue economy*, tema ini diangkat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi resesi yang akan berdampak pada kegiatan perekonomian dunia, masyarakat kota Surabaya diharapkan mampu mengusulkan inovasi-inovasi konstruktif yang dapat meningkatkan atau mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- Tahun 2024, mengusung tema “Inovasi dalam rangka peningkatan potensi wisata & perbaikan lingkungan berkelanjutan”, tema ini diangkat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam peningkatan potensi wisata dan perbaikan lingkungan di kota Surabaya, tema ini bertujuan agar masyarakat bisa memberikan inovasi-inovasi kreatif dibidang pariwisata dan lingkungan hidup yang mana kegiatan ini sejalan dengan prioritas pembangunan kota Surabaya
- Tahun 2025, mengusung tema “Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dan mitigasi bencana”, tema ini bertujuan agar masyarakat dapat turut serta memberkan sumbangsih ide dan

inovasi terkait peningkatan infrastruktur kota Surabaya dan mitigasi bencana yang bisa terjadi di kota Surabaya.

- Tahun 2026, mengusung tema “Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan Kemanan sosial”, tema ini diangkat untuk memberikan ruang pada masyarakat kota Surabaya dalam memberikan gagasan terkait peningkatan kualitas SDM baik dari sisi Pendidikan, pelatihan kerja, dan lain sebagainya, selain itu keamanan sosial juga merupakan prioritas pembangunan kota Surabaya yang berhubungan dengan SDM.

Infografis terkait tema inovasi daerah kota Surabaya dapat dilihat pada Gambar 6.1. dibawah ini



Gambar 7.1 Tema Inovasi Daerah Kota Surabaya 2022-2026

Tabel 7.1 Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan**Tema Tahun 2021 : Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN
1	– Pembukaan lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	73,02	%
2	– Ciptakan wirausaha baru – Pengembangan dan fasilitasi sentra-sentra PKL rakyat	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85,71	%
3		Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100	%
4		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	8,97	%
5		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100	%
6		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	66	%

7		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	10	orang/ke lompok
8		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	27	%
9		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	75	%
10		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	42,41	%
11		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100	%
12		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	26	%
13		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	10	Lokasi
14		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung	1.13	Ha

			cadangan pangan masyarakat		
15		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah pembudidaya pekarangan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	20	Orang
16		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100	%
17		Program Penyuluhan Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian	5,57	ton/ha
18		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93	%
19		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	80	%

Tema Tahun 2022 : Inovasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	SATUAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sertifikasi keahlian kerja gratis untuk warga - Bangun pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital - Revitalisasi pasar tradisional untuk membangkitkan ekonomi rakyat 	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	12	%
2		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	12	%
3		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	1	%

4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	720	%
5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	912	%
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	720	%
7	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	30	%
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	11.000	%
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80.000	%
10	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	3	%
11	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	83	%
12	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang	13	%

			dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial		
13		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	135	%
14		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	10	%
15		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	179	%
16		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	1.310	%
17		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2	%
18		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4	%
19		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	415	%

20		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	4	%
21		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	12	kasus
22		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	300	lembaga
23		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	2,79	%
24		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	3	%
25		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	1	orang/kelompok
26		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	32	orang/kelompok
27		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	1	%
28		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	1	%

29		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN	70	Perusahaan
30		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	3	%
31		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	2	%
33		Program Pengembangan Umkm	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	500	%
34		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	12	%
35		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	1.100	%
36		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12	%
37		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	3	%
38		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan	12	%

			yang difasilitasi		
39		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	4	Lokasi
40		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	13	Ha
41		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	10	Orang
42		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	25	%
44		Program Penyuluhan Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian	6	ton/ha
45		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100	%
46		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	90	%
47		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	3	%
48		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya siklus	12	%

			koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD		
49		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	80	%
50		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	200	%

Tema Tahun 2023 : Inovasi dalam Rangka Peningkatan Inklusif Dan Blue Economy

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2023	SATUAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Bangun 4 mal pelayanan publik mini merata ke seluruh Surabaya - Pemberian insentif dan bangun sistem pelayanan investasi berkelas dunia - Penguatan kerja sama nasional-internasional untuk program magang anak muda - Fasilitasi UMKM menuju taraf nasional dan internasional 	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13,14	%
2		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	30	%
3		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	23	%
4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100	%
5		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	40	%

6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	19,95	%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100	%
8	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100	%
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100	%
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,04	%
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,50	%
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,18	%
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100	%
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	79,37	%
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100	%

16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jaminan Kesehatan	96,97	%
17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100	%
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100	%
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98	%
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08	%
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100	%
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	55	%
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sehat	88,19	%
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100	%
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,103	%
26	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2	hari

27	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14	hari
28	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	92	%
29	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	83	%
30	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100	%
31	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	38,91	%
32	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98	%
33	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	77,42	%
34	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100	%
35	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100	%
36	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100	%
37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100	%

38	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	29	%
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2,5	%
40	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100	%
41	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100	%
42	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL	kasus
43	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20	lembaga
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,24	%
45	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25	orang/kelompok
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	35	%
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100	%

48		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN	170	Perusahaan
49		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80	%
50		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	22	%
51		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	40	%
52		Program Pengembangan Umkm	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	64	%
53		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	82	%
54		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	43	%
55		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100	%
56		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	65	%

57	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100	%
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	19	Lokasi
59	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2	Ha
60	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah pembudidaya pekarangan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30	Orang
61	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100	%
62	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya \geq 76%	84,5	%
63	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	80	%
64	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	17	%
65	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93	%
66	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100	%

67		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55	%
68		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100	%

Tema Tahun 2024 : Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Pariwisata Dan Pengembangan Lingkungan Berkelanjutan

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	– Revitalisasi fasilitas seni budaya dan olahraga menjadi berkelas dunia	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04	%
2	– Pengembangan wisata sejarah, wisata kota dan MICE berbasis pemberdayaan warga	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	43,5	%
3	– Fasilitas pembinaan atlit dan olahraga usia muda	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100	%
4	– Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pembinaan Sejarah	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	76	%
5	– Peningkatan manajemen sampah terpadu untuk Surabaya bersih	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	48	obyek
6	– Pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100	%
7		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat	100	%

			dalam Upaya Mitigasi Bencana		
8		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	(kosong)
9		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100	%
10		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100	%
11		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL	kasus
12		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100	%
13		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911	m3
14		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100	%
15		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,49	%
16		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100	%
17		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100	%

18		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12	%
19		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah ke TPA \leq 1 hari	88,01	%
20		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51	%
21		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	100	%
22		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	80	%
23		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	60,00	%
24		Program Pengembangan Permukiman	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9	%
25		Program Pengembangan Permukiman	Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100	%
26		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100	%
27		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80	%
28		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	24	%
29		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	60	%

30	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80	%
31	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90	%
32	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	46	%
33	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	86	%
34	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	71,20	%
35	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	50	%
36	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelayanan penataan ruang	95	%
37	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100	%

Tema Tahun 2025 : Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Mitigasi Bencana

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir - Pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, ibu hamil dan lansia - Penyediaan tempat penitipan anak (day care) profesional-gratis di kampung dan fasilitas public - Pengembangan sistem transportasi terpadu dan modern urai kemacetan - Pavingisasi dan penataan seluruh kampung - Pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 	Program Kawasan Permukiman	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97	%
2		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56	%
3		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase event literasi yang diselenggarakan	79,2	%
4		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	79,95	%
5		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	89.07	%
6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100	%
7		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06	%
8		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,60	%
9		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,20	%
10		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100	%
11		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	82,54	%

12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100	%
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jaminan Kesehatan	97,60	%
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100	%
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100	%
16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98	%
17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08	%
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100	%
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	58	%
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sehat	88,21	%
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100	%
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,101	%

23	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2	hari
24	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14	hari
25	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97	%
26	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90	%
27	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100	%
28	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77,83	%
29	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99	%
30	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32	%
31	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100	%
32	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100	%
33	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100	%
34	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100	%

35	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100	%
36	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100	%
37	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang ber IMB	2,51	%
38	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,99	%
39	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	87	%
40	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	
41	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100	%
42	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100	%
43	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100	%
44	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	29,42	%
45	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	88,10	%
46	Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	16,03	%

47	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3	%
48	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	88	%
49	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100	%
50	Program Pengembangan Permukiman	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9	%
51	Program Pengembangan Permukiman	Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100	%
52	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100	%
53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	80	%
54	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100	%
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	29	Lokasi
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2	Ha
57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah pembudidaya pekarangan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40	Orang
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48	km/jam

59		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70	%
60		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80	%
61		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80	%
62		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100	%
63		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100	%
64		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100	%
65		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100	%
66		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100	%
67		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100	%
68		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100	%

69	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	18	%
70	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25	%
71	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.38	%
72	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,73	%
73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37	%
74	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45	%
75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71	%
76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32	%
77	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27	%
78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	29,53	%
79	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77	%
80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.15	%
81	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33	%
82	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45	%
83	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14	%
84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11	%

85	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51	%
86	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02	%
87	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50	%
88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.15	%
89	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51	%
90	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51	%
91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19	%
92	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81	%
93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	74,03	%
94	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,7	%
95	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16	%
96	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelayanan penataan ruang	96	%
97	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	79,98	%
98	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100	%
99	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%

100		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%
101		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%
102		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%
103		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100	%

Tema Tahun 2026 : Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM Dan Kemanan Sosial

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	SATUAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian BOPDA dan subsidi SD-SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah - Peningkatan kapasitas guru - Pemberian beasiswa kuliah dalam/luar negeri bagi anak kurang mampu, berprestasi dan atlet - Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri 	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100	%
2		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85,02	%
3		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	91,7	%
4		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100	%
5		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	21	tahun

6	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan tenaga medis Kesehatan - Pemberian insentif dan fasilitas BPJS kesehatan bagi pelaku seni budaya 	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.58	%
7		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55.76	%
8		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44	%
9		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100	%
10		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100	%
11		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100	%
12		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100	%
13		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.98	%
14		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.60	%
15		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86	%
16		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	100	%
17		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100	%

18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,07	%
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,65	%
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,21	%
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100	%
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84,13	%
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100	%
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jaminan Kesehatan	98,00	%
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100	%
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100	%
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100	%
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08	%

29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100	%
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60	%
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sehat	88,22	%
32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100	%
33	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,100	%
34	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2	hari
35	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14	hari
36	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100	%
37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100	%
38	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100	%
39	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100	%
40	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100	%
41	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100	%
42	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100	%

43	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100	%
44	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100	%
45	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100	%
46	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1 : 20	
47	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1 : 20	
48	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100	%
49	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100	%
50	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77	%
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100	%
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99	%
53	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	%
54	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Kelulusan SMP/MTS	100	%
55	Program Pengelolaan Pendidikan	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100	%
56	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	100	%

57	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57	%
58	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,85	%
59	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91,43	%
60	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100	%
61	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD terakreditasi minimal B	95,04	%
62	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,44	%
63	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100	%
64	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205	medali
65	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28	%
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28	%
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28	%
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,98	%

69	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100	%
70	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62,00	%
71	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96	%
72	Program Pengendalian Penduduk	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100	%
73	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94	%
74	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53,52	%
75	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100	%
76	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100	%
77	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase PPNS yang dibina	100	%
78	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100	%
79	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%
80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100	%

81	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100	%
82	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283	
83	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100	%
84	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87	%
85	Program Perlindungan Khusus Anak	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%
86	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100	%
87	Program Perlindungan Perempuan	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%
88	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100	%
89	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti social	100	%

90		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%
91		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%
92		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100	%

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.

Jakarta Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

